

METODE MENDISIPLINKAN MURID

**(Studi Tentang Manajemen Kedisiplinan Sistem Kredit Dan
Pendidikan Disiplin Di SMA Negeri 50 Jakarta)**



Adam Setyobismo

4815067139

**Skripsi yang Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2011

ABSTRAK

Adam Setyobismo, Metode Mendisiplinkan Murid (Studi Tentang Manajemen Kedisiplinan Sistem Kredit dan Pendidikan Disiplin di SMA Negeri 50 Jakarta). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan mendalami pelaksanaan Penegakan Sistem Kedisiplinan yang mempunyai studi tentang manajemen kedisiplinan sistem kredit dan pendidikan disiplin di SMA Negeri 50 Jakarta.

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 50 Jakarta selama tujuh bulan dari Oktober sampai dengan Mei 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, yakni teknik pengumpulan data melalui observasi, memberikan kuesioner kepada responden terpilih sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membuktikan bahwa kedisiplinan dilaksanakan di sekolah ini, kemudian mewawancaranya dan studi literatur.

Dapat diketahui bahwa temuan penelitian di lapangan, penulis mendapatkan konsepsi sistemik penegakan kedisiplinan sekolah secara sistem kredit poin dengan peningkatan motivasi belajar murid dari informan kesiswaan, guru BP, wali kelas dan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa bukan sistem yang terintegrasi dengan disiplin, sekolah memiliki kebijakan sistem kredit poin yang mencerminkan filosofi manajemen mereka. Selanjutnya ditemukan bahwa salah satu masalah utama dari kebijakan disiplin sekolah adalah bahwa tidak semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan konsisten menegakan aturan. Hasilnya adalah bahwa kebijakan perlu diterapkan secara ketat dalam rangka untuk menjadikan murid berada di lingkungan akademik yang produktif.

Kata kunci: Pendidikan, Manajemen Kesiswaan, Kedisiplinan

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Drs. Komaruddin, M.Si.
NIP. 19640301 199103 1 001

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dra. Evy Clara, M.Si.</u> NIP. 19590927 198403 2 001 Ketua
2.	<u>Dian Rinanta Sari, S.Sos</u> NIP. 19690306 199802 2 001 Sekretaris
3.	<u>Drs. Komaruddin, M.Si.</u> NIP. 19640301 199103 1 001 Penguji Ahli
4.	<u>Dr. Robertus Robet, M.A.</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Pembimbing I
5.	<u>Dr. Eman Surachman, M.M.</u> NIP. 19521204 197404 1 001 Pembimbing II

Lulus Tanggal: 30 Desember 2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Adam Setyobismo
No. Registrasi : 4815067139
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Metode Mendisiplinkan Murid (Studi Tentang Manajemen Kedisiplinan Sistem Kredit dan Pendidikan Disiplin Di SMA Negeri 50 Jakarta)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bulan November 2010 – Mei 2011.
2. Bukan merupakan duplikasi yang pernah di buat orang lain atau penjiplakan karya tulis orang lain dan bukan terjemahan karya tulis orang lain.

Pernyataan ini saya buat secara sadar dan saya bersedia menanggung sanksi dari pihak Universitas Negeri Jakarta, jika pernyataan saya tidak benar.

Jakarta, Juni 2011
Pembuat Pernyataan

(Adam Setyobismo)

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَى عَلَى الْفَلَاحِ

Marilah Menggapai Kemenangan
(Seruan Adzan Ke Lima)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
تَجِدُ الْمُؤْمِنَ مُجْتَهِدًا فِيمَا يُطِيقُ مُتَكَهِّفًا
مَا لَا يُطِيقُ . رواه احمد

Engkau Akan Menemukan Seorang Mukmin
Bersungguh-Sungguh Pada Apa Yang Mampu Dilakukannya
Dan Merasa Sedih Atas Apa Yang Tidak Mampu Dilakukannya
(Hadis Riwayat Ahmad)

Yang Baik I tu Kalau Mengerti Akan Hidup
Bermasyarakat Dan Bernegara, Maka
Di Depan Memberi Teladan,
Di Tengah Menjadi Penggerak,
Di Belakang Memberi Daya Dorong Kekuatan
(Ki Hajar Dewantara)

KATA PENGANTAR

Ya, Allah terima kasih atas curahan rahmat dan hidayah-Nya dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua penulis yang telah memberikan fasilitas memadai dari awal hingga akhir skripsi ini. Sebagaimana layaknya pengantar tentu penulis mengharapkan aksara ini dapat bermanfaat terutama kepada pribadi penulis, kerabat penulis, mahasiswa, dosen, para pemerhati pendidikan dan para pimpinan SMA Negeri 50 Jakarta.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan. Memang selama penulis membuat karya ini telah mendapatkan anugrah dan paradigma dari pelbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan fakultas ilmu sosial yang terhormat Drs. Komarudin, M.Si. Sebagai dekan, pembimbing akademik sekaligus penguji ahli skripsi ini.
2. Dra. Evy Clara MSi. Sebagai ketua jurusan Sosiologi.
3. Dr. Robertus Robet, MA. Sebagai dosen pembimbing pertama. Untuk bimbingan materi skripsi, motivasi, falsafah dan teori-teori sosiologi: klasik, modern dan posmodern yang telah diberikan.
4. Dr. H. Eman Surahman, MM. Sebagai dosen pembimbing ke dua. Untuk bimbingan metodologinya. Serta teori-teori pendidikan yang telah diberikan.

5. Drs. Dwi Eko Priyo S. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang telah berkontribusi dalam memberikan data sekunder. Serta Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 50 Jakarta yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan: Asep Jamal Syaburi, Nurmala Mardiani dan Ikhsan Aji Kusumah sebagai teman baik dikala susah dan senang. Kemudian July Satriana atas bantuan kritik dan saran untuk skripsi ini. Dan Hanifa Maulidia sebagai teman sidang yang baik.
7. Arie P.(Sosiologi – UI), Adit S.(Filsafat – UI), Pak Daniel H. Untuk pemberian wawasan sosiologisnya. Dan teman-teman pendidikan sosiologi non reguler angkatan 2006, 2007, 2008 dan 2009.
8. Om Andi yang telah memberikan musik sehingga menambah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adam Setyobismo

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Penelitian Sejenis.....	6
F. Kerangka Konseptual.....	7
1. Interaksi Antara Guru dan Murid.....	9
2. Manajemen Kesiswaan.....	10
3. Landasan Disiplin Sekolah SMTA Dan Pembinaan Kesiswaan Menuju Kemandirian.....	11
4. Taksonomi Bloom.....	13
5. Sekolah Adalah Sistem Manusia.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
1. Subjek Penelitian.....	19
2. Peran Peneliti.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
H. Keterbatasan Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II KEADAAN SMA NEGERI 50 JAKARTA	
A. Pengantar.....	26
B. Situasi SMA Negeri 50 Jakarta.....	26
1. Kualitas Akademik Sekolah.....	26
C. Letak Geografis dan Kondisi SMA Negeri 50 Jakarta.....	28
1. Asal Usul Norma Kredit Poin Untuk Murid.....	30
D. Rangkuman.....	33
BAB III KREDIT POIN DALAM KEDISIPLINAN MURID	
A. Pengantar.....	35
B. Sanksi Kredit Poin Dalam Konteks Disiplin.....	35
C. Kredit Poin Sebagai Wewenang Resmi Untuk Mengawasi Murid.....	36
1. Kontrol Agen Ganda.....	42
2. Penegakan Agen Dalam Sistem Kredit Poin.....	44
D. Melestarikan Sistem Kredit Poin.....	47
1. Melestarikan Penegakan Agen Dalam Sistem Kredit Poin Secara Formal.....	47
2. Melestarikan Penegakan Agen Dalam Sistem Kredit Poin Secara Non Formal.....	53
E. Rangkuman.....	56
BAB IV KESINAMBUNGAN MENINGKATAN DISIPLIN DAN MOTIVASI BELAJAR	
A. Pengantar.....	57
B. Penilaian Murid Terhadap Aturan Kredit Poin.....	57
C. Fungsi Manifest Dalam Kredit Poin.....	59
D. Fungsi Laten Dalam Kredit Poin.....	61
E. Rangkuman.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbedaan Antara Penggunaan Disiplin dan Penghukuman.....	40
Tabel 3.2. : Fungsi Pengawas dan Pengkontrol Sistem Kredit Poin.....	43
Tabel 4.1. : Responden.....	61
Tabel 4.2. : Pengalaman Telat.....	62
Tabel 4.3. : Bisa Masuk Sekolah Atau Tidak.....	62
Tabel 4.4. : Pengalaman Bolos.....	63
Tabel 4.5. : Sanksi Dari Guru Yang Bersangkutan.....	64
Tabel 4.6. : Orang Tua Murid Dipanggil Aparatus.....	65
Tabel 4.7. : Orang Tua Mangkir.....	65
Tabel 4.8. : Pengalaman Diskorsing.....	66
Tabel 4.9. : Berapa Kali Diskorsing.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Sistem Tindakan Lengkap.....	17
Gambar 1.2. : Peta Konsepsi Hierarki Siberatik Kendali Budaya Sekolah.....	19
Gambar 2.1. : Struktur Organisasi SMA Negeri 50 Jakarta.....	29
Gambar 2.2 : SMA Negeri 50 Jakarta.....	30
Gambar 2.3. : Prinsip Kedisiplinan SMA Negeri 50 Jakarta.....	33
Gambar 3.1. : Jenjang Penanganan Tata Tertib Murid.....	41
Gambar 3.2. : Penegakan Kedisiplinan Dalam Aturan Poin Pelanggaran No. B7.....	49
Gambar 3.3. : Penegakan Kedisiplinan Dalam Aturan Poin Pelanggaran No. B7.....	51
Gambar 3.4. : Penegakan Kedisiplinan Non Formal.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Point Pelanggaran SMA Negeri 50 Jakarta.....	73
Point Pelanggaran SMA Negeri 50 Jakarta (Sambungan).....	74
Kuesioner Penelitian Penegakan Kedisiplinan.....	75
Kuesioner Penelitian Penegakan Kedisiplinan (Sambungan).....	76
Wawancara Kepada Informan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan membudaya sangat lama di dunia ini, bahkan usianya hampir setua sejarah manusia itu sendiri. Untuk menganalisa fungsi pendidikan Indonesia saya sedikit mengulas sejarah pendidikan Indonesia yang paling menarik sepanjang sejarah pendidikan yakni periode 1892 – 1920 (sekolah tradisional). Dalam periode tersebut pembentukan sistem pendidikan yang memungkinkan anak Indonesia belajar dari tingkat rendah sampai tingkat yang paling tinggi, walaupun harus ditempuh dengan pelbagai lika-liku problematik dan “tekanan politis” dari pihak asing (penjajah). Menurut S. Nasution mengatakan:

“Pada periode 1892 – 1920 pendidikan mulai dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai jalan mobilitas sosial vertikal walaupun untuk keperluan pemerintah dan perusahaan Belanda yang sekaligus menjadi tujuan umum pendidikan kala itu. Kurikulum sebagai tujuan khusus sebelum reorganisasi 1892 tidak mempunyai kurikulum *uniform*, walaupun dalam peraturan 1871 ada petunjuk yang menentukan kegiatan sekolah. Ada empat mata pelajaran yang diharuskan, yakni membaca, menulis, bahasa (bahasa daerah atau bahasa melayu), dan berhitung”.¹

Kemudian menurut Oemar Hamalik “tujuan umum pendidikan adalah mewariskan kebudayaan sistem kerajaan dan ilmu sains asing. Berkurikulum berdasarkan mata pelajaran. Pembelajaran murid sebagai penerima mengikuti saja.

¹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 37

Disiplin kontrol dengan paksaan. Metode mengajar menuangkan, mempertunjukkan, menjelaskan dan mengingatkan”.²

Tentu usah tentang demokrasi kala itu, sedangkan sistem pendidikan saat ini memperhatikan demokrasi bagi warga negaranya yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003. Dalam sistem ini diatur fungsi pendidikan secara yuridis dalam pasal 3 berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.³

Adapun menurut peneliti, Konsepsi pembangunan pendidikan disiplin mempunyai dua aspek yang berpasangan demokrasi dan proses politik adalah *rule of law*, ibarat sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa *rule of law* akan menjadi anarki. *Rule of law* tanpa demokrasi juga akan menjadi suatu yang mengarah pada sistem otoriter. Jadi, demokrasi, proses politik dan *rule of law* itu tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan etimologis fungsi pendidikan atau edukasi adalah melatih (*educare*) dan memiliki kepemimpinan untuk hidup (*educere*). Kamanto sunarto dalam Horton dan Hunt dari pendekatan sosiologis mengatakan “fungsi pendidikan terbagi dua; Fungsi nyata (manifest) dan fungsi pendidikan tersembunyi atau laten”.⁴

² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 56

³ Depdiknas, UU. No. 20 tahun 2003, Jakarta: Visi media, 2003.

⁴ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Depok: Penerbitan Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 68

Tujuan pendidikan berlandaskan keilmuan sosial menjadikan keterampilan disiplin dalam kepribadian seseorang. Ini adalah bekal dalam memuat kedua fungsi pendidikan yakni manifest dan laten. Fungsi manifest kepribadian disiplin adalah interaksi antar anggota masyarakat agar harmonis. Dan fungsi laten dapat menyebabkan tindak penipuan dan tekanan psikologis berupa peningkatan kejenuhan.

Dari tujuan umum pendidikan tersebut yang menyinggung demokrasi, dalam sejarah kedisiplinan, tidak diatur dalam koridor demokrasi sebagaimana dalam aturan gerakan disiplin nasional 1995 tentang tata tertib sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) dan sekolah menengah tingkat atas (SMTA) dalam buku ini diatur tentang kedisiplinan salah satunya tentang keterlambatan:

“Apabila seorang siswa terlambat, wajib melapor kepada guru piket untuk mengemukakan alasan yang syah, dan kalau diizinkan guru piket barulah diperkenankan mengikuti pelajaran yang sedang berjalan.”⁵

Secara umum kedisiplinan sekolah mengacu pada buku tersebut diantaranya sama dengan sistem kredit poin dan diantara lainnya telah berubah. Pada waktu itu, sistem kedisiplinan diatur secara sentralisasi. Namun setelah ada kebijakan otonomi daerah kewenangannya diatur secara desentralisasi.

Sekarang peraturan sekolah yang salah satunya kedisiplinan mengacu pada peraturan suku dinas pendidikan setempat yakni kedisiplinan sistem kredit dan secara khusus kedisiplinan termuat dalam peraturan gubernur nomer 11 tahun 2009 tentang jam masuk sekolah, terdapat dalam pasal 2 ayat 1 butir (b) menyatakan bahwa “Siswa

⁵ D. Sumarno, *Gerakan Disiplin Nasional 1995 Tata Tertib Sekolah Negeri/Swasta SMTP/SMTA*, Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 1995, hlm. 143 – 147

kelas IV sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sampai dengan SLTA masuk sekolah pada pukul 06.30".⁶ Ternyata peraturan gubernur tersebut dapat diterapkan dalam disiplin di SMA ini yaitu berupa konsepsi kedisiplinan sekolah ini yang bernama sistem kredit poin. Aturan ini memberikan batas skor 100, skor akan diberikan bilamana murid melanggar tata tertib sekolah.

Masalah penelitian ini secara sosiologis dapat diketahui dari proses struktural dalam rangka penegakan sistem kredit poin. Sebagaimana pemikiran teori strukturasi: tiga prinsip struktural yaitu struktur signifikansi pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan legitimasi. Dalam hal ini, skemata kredit poin mempunyai *signifikansi* yaitu orang yang menegakan kredit poin disebut petugas yang berwenang, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan penyuluhan dan wali kelas disebut aparatus pada gilirannya menyangkut skemata *dominasi* yakni otoritas aparatus atas murid dan juga skemata *legitimasi* berarti hak aparatus menegakan kredit poin atas 'pemberian poin' bagi murid yang melanggar kedisiplinan, apabila poin kredit yang diberikan telah melebihi dari batas ketentuan maka murid yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah ini.

⁶ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2009, Tentang Jam Masuk Sekolah.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi norma kredit poin dalam mengembangkan pendidikan disiplin?
2. Apa fungsi kredit poin bagi murid?
3. Apakah sistem kredit poin cukup efektif untuk dapat meningkatkan kedisiplinan siswa?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini mempunyai maksud mengkaji pembentukan murid dalam sistem kredit poin. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengungkap fungsi dan kedisiplinan kredit poin dalam rangka mendisiplinkan para murid SMA Negeri 50 Jakarta. Dan menggugah konseptualisasi pendidikan karakter khususnya dalam bidang keteladanan dalam hal disiplin pribadi di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis diharapkan dapat bermanfaat yakni untuk pengembangan kedisiplinan sekolah dan untuk menjelaskan fungsi kredit poin. Membangun kedisiplinan secara sistem kredit poin, diharapkan dapat membuahkan edukabilitas pendidikan karakter yang diperoleh dari kebijakan sekolah dan termasuk segala bentuk dampak perilaku dari sistem kedisiplinan tersebut. Dari pelaksanaan prosesi sistem kredit sehari-hari yang dilakukan agen penegak

sistem kredit poin mengesankan perilaku disiplin yang dapat diperoleh murid dari afirmasi dan manifestasi nilai. Sehingga tercipta iklim sekolah yang kondusif disiplin, semoga.

E. Tinjauan Penelitian Sejenis

Dalam tinjauan penelitian sejenis skripsi dari Susi Widyaningsih⁷ yang berjudul “Hubungan Antara Disiplin dan Prestasi Belajar” menunjukkan hasil positif. Dengan variabel disiplin murid antara lain: sopan santun, kehadiran murid, pelaksanaan 5K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian seragam pribadi), catatan pelajaran, pemeliharaan buku perpustakaan dan tugas yang diberikan guru. Jadi dari hasil positif penelitian diketahui semakin tinggi tingkat disiplin murid maka semakin tinggi pula prestasi yang diperoleh murid, dari sekolah itu.

Sedangkan penelitian lainnya yang berjudul “Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah” dari Dede Kurniasih⁸ penulis menjelaskan bahwa seharusnya hukuman bukan berupa hukuman fisik karena anak dilindungi oleh ‘hukum negara’ yang mana terdapat dalam skripsi pada halaman 97 menerangkan tentang undang-undang perlindungan anak yang melarang hukuman fisik (kekerasan terhadap anak). Sedangkan pada halaman 94 sampai dengan 96 menjelaskan betapa sekolah menengah atas negeri 31 Jakarta menggunakan kekerasan fisik dan psikis terhadap

⁷ Susi Widyaningsih, 1985, “Hubungan Antara Disiplin dan Prestasi Belajar”, Skripsi, IKIP Jakarta, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

⁸ Dede kurniasih, 2010, “Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah”, Skripsi, UNJ, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial

peserta didiknya. Oleh sebab kekerasan itu kiranya pihak sekolah boleh menerapkan kedisiplinan yang lebih baik.

Dari kedua tinjauan tersebut, mendeskripsikan bahwa disiplin adalah proses pendidikan yang penting di sekolah. Studi yang penulis lakukan adalah pendekatan dari kedua skripsi tersebut sebagai peta studi sejenis tentang penegakan kedisiplinan dan konsepsinya pada prestasi belajar murid dalam cara, ruang dan waktu yang berbeda. Dari sekolah-sekolah dan zaman yang berbeda tentu pembentukan karakteristiknya berbeda juga, sebagai dua studi sejenis tersebut dapat bermanfaat untuk referensi deskriptif atas penegakan kedisiplinan dan tautannya pada prestasi belajar murid.

F. Kerangka Konseptual

Merupakan suatu pendapat yang keliru bahwa disiplin adalah hukuman, namun disiplin adalah saling menghormati. Adakalanya maksud dan tujuan dari pendidik baik di rumah maupun di sekolah memberikan hukuman dengan alih-alih memberikan pelajaran disiplin. Pendapat inilah yang keliru menurut Jane Nelsen; master psikologi pendidikan dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pandangan disiplin tersebut termasuk dalam kategori pengawasan ketat atau sebaliknya tidak efektif dan efisien untuk mengedukasi kebiasaan. Menurutnya disiplin harus bersifat demokratis dan mempunyai pandangan positif yang bernama “Disiplin Positif”.

Disiplin positif adalah metode untuk mengedukasi anak untuk bersikap patuh dan disiplin. Salah satu perbedaan adalah bahwa *Disiplin Positif tidak menindas*

anak-anak, maupun orang dewasa. Menurut Jane Nelsen yang diterjemahkan oleh Sumarjinah “kontrol yang terlalu ketat biasanya melibatkan hukuman yang menyiksa anak-anak. Kebebasan menyiksa orang dewasa. Disiplin Positif berdasarkan pada saling menghargai dan bekerja sama. Disiplin Positif melibatkan ketegasan dengan kewibawaan dan rasa hormat”.⁹

Dalam buku tersebut memperlihatkan bahwa penguatan disiplin positif bagi anak dan remaja adalah suatu metode efektif untuk mengedukasi disiplin. Jika buku tersebut dilakukan secara pendekatan individu, penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan sistemik dan terstruktur di SMA. Kredit poin adalah sistem yang membuat disiplin positif di sekolah ini, pembentukan sistem ini menjadi interaksi diad yakni antara murid dan guru.

Dalam analisis sosiologis tentang makna disiplin, baiklah kita melihat lebih dulu tinjauan sosiolog klasik. Mengenai disiplin Max weber yang diterjemahkan oleh Noorkholish memberi batasan disiplin adalah “bahwa kepatuhan orang-orang yang prural diseragamkan secara rasional”¹⁰. Konteks diseragamkan suatu bentuk interaksi struktural yang mendisiplinkan murid secara birokrasi, di mana konsepsi birokrasi dalam penelitian ini disebut kredit poin.

⁹ Jane Nelsen, *Positive Discipline*, Terjemahan Sumarjinah, Jakarta: Delapratasa, 1997, hlm. 9

¹⁰ Max Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Terjemahan Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 303

1. Interaksi Antara Guru dan Murid

Dalam peristiwa yang telah dijelaskan dalam latar belakang secara sekilas tentang situasi kredit poin, konsep diad terjadi manakala dalam pendidikan sekolah antara murid dan guru atau sebaliknya berinteraksi khususnya tentang sistem kredit poin. Menurut Anthony Giddens yang diterjemahkan oleh Maufur dan Daryanto mengatakan:

“Murid yang memiliki wewenang berfungsi sebagai pengawas, dalam konteks ini guru mempunyai otoritas terhadap murid. Konsep adaptasi dan kekuasaan dalam konteks ini dimaknai umum atau *lumrah* oleh warga sekolah, yang digunakan tersirat dalam kekuasaan yang diciptakan di dalam dan melalui struktur dominasi, bersumber daya otoritatif yang memberikan tuas pada ruang kekuasaan dalam memegang wewenang untuk mereproduksi sistem kredit poin”.¹¹

Atau jika dibahasakan lebih lanjut, guru sebagai agen struktur legitimasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas kekuasaan dalam hal pemberian sanksi kredit poin kepada murid. Dari interaksi diad tersebut dapat ditinjau dari perspektif konstruksionis yang mana konsepnya merujuk pada proses produksi dan reproduksi sosial. Zainuddin Maliki mengatakan:

“dalam perspektif ini aktor tidak bebas memilih bagaimana menciptakan masyarakat, tetapi dibatasi oleh kendala (*constraint*) lokasi sejarah di luar pilihan mereka sendiri. Struktur memiliki kapasitas ganda (*dual capacity*), dalam hal ini bisa menjadi kendala (*constraining*), tetapi juga bisa memberi peluang (*enabling*) bagi manusia agency. Setiap tindakan manusia atau struktur mengandung tiga aspek, yaitu: makna, norma dan kekuasaan”.¹²

Dalam membahas ketiga aspek tersebut diperlukan apoteori manajemen kesiswaan. Pertama, untuk membahas makna konsepsi kredit poin tentang pendidikan

¹¹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Terjemahan Maufur & Daryanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 400 – 406

¹² Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 228

disiplin. Kedua, landasan disiplin sekolah SMTA dan pembinaan kesiswaan menuju kemandirian untuk membahas tentang manfaat norma kredit poin bagi murid. Ketiga, teori tujuan belajar(Bloom) atau lebih di kenal dengan sebutan klasifikasi atau taksonomi Bloom untuk membahas tentang tujuan kekuasaan dalam penegakan norma kredit poin.

2. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Rohiat mengatakan “kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: perencanaan murid baru, pembinaan siswa, dan kelulusan”.¹³

Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah pada jam sekolah. Bertujuan untuk siswa menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya secara baik. Salah satu hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa adalah membina disiplin siswa, untuk hal ini sistem kredit kedisiplinan berada.

Pelaksanaan kredit poin adalah salah satu produk pembinaan disiplin siswa. Berikut adalah contoh pelaksanaan sistem kredit, murid membolos akan diberikan skor 12 maka tiap murid membolos maka wali kelas berwenang memberikan sanksi

¹³ Rohiat, *Manajemen Sekolah*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 25

sesuai pada ketentuan kredit poin di SMA ini, selanjutnya apabila jumlah poin pelanggaran lebih dari 30 poin adalah tanggung jawab guru BP (bimbingan penyuluhan) dan BK (bimbingan karir). Selain hal tersebut sekolah juga menerapkan peraturan masuk-keluar murid dari sekolah, murid masuk pukul 6.15 dengan toleransi keterlambatan 15 menit jadi pada pukul 6.35 pintu gerbang sekolah telah ditutup bagi murid. Dengan kebijakan ini diharapkan murid membiasakan datang lebih pagi sehingga rajin ke sekolah dan semangat belajar. Selanjutnya sebagai konsekuensi logis mereka dapat meningkatkan prestasi akademik di sekolah, dari pada mereka datang lebih siang.

3. Landasan Disiplin Sekolah SMTA

Dan Pembinaan Kesiswaan Menuju Kemandirian

Penyeragaman tata tertib sekolah telah baku sejak tahun 1995 dalam proyek pembangunan lima tahun (PELITA), dan dibukukan yang mempunyai judul “Gerakan Disiplin Nasional”. Salah satu terbitannya adalah tata tertib sekolah negeri / swasta SMTP / SMTA, di dalam buku ini diatur tentang disiplin. Memuat diantaranya hak dan kewajiban siswa, pelarangan perilaku tertentu saat jam sekolah dan sanksi-sanksi untuk siswa yang melakukan pelanggaran. Namun seiringnya waktu bergulir kedisiplinan kini manajemen sekolah diatur secara otonom oleh daerah masing-masing sesuai dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang mana sesuai dengan UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 51 ayat 1 yang berbunyi:

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”.¹⁴

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan menurut Bedjo Sujanto “sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat (*stake holder*) yang dilayani, dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan”.¹⁵

Dalam manajemen pendidikan berdasarkan undang-undang tersebut tujuannya adalah membangun pendidikan dengan basis kedaerahan, begitupun kedisiplinan sistem kredit yang berlaku di DKI Jakarta. Perubahan pada kebijakan struktur sosial dari sentralisasi pada otonomi daerah, menjadikan kebijakan kedisiplinan ini ada. Dahulu kedisiplinan identik dengan hukuman berupa kekerasan. Kini harus diakui bahwa hak-hak siswa secara asasi harus dipenuhi, sehingga disiplin tanpa kekerasan. Oleh sebab itu, apabila suatu sekolah ingin berhasil maka partisipasi aktif siswa dalam memerankan sistem kredit harus diindahkan, sebagaimana konsepsi kedisiplinan adalah saling menghormati bukan dengan cara kekerasan dalam mendisiplinkan siswa. Jadi, apabila siswa tidak mengindahkan norma sistem kredit, jatuhlah putusan hukuman kepada siswa yang bersangkutan. Sehingga partisipasi aktif para siswa di dalam berbagai keputusan harus ditingkatkan baik dari kedua sisi yakni sisi penegakan agen, maupun dari sisi kehormatan asasi siswa sebagai manusia.

¹⁴ Depdiknas, UU. No. 20 tahun 2003, Jakarta: Visi media, 2003.

¹⁵ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: C.V. Sagung Seto, 2008, hlm.53

4. Taksonomi Bloom

Taksonomi ini mempunyai tiga ranah pembelajaran secara keseluruhan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana menurut Sri Esti W.D terdapat:

“empat tahapan yakni sebelum kita memahami sebuah konsep maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu, sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya terlebih dahulu sebelum kita mengevaluasi hasilnya maka kita harus mengukur atau menilai, kemudian sebelum kita berkreasi sesuatu maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi, serta memperbaharui. Namun dalam membahas kredit poin sebagai tujuan kekuasaan dalam penegakan norma kredit poin saya hanya menitikberatkan pada konsep tujuan belajar secara afektif atau ranah afektif (mempunyai ruang lingkup emosi atau perasaan). Dalam taksonominya ada lima, yakni penerimaan, partisipasi, penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup”.¹⁶

Keterampilan tersebut dalam domain afektif menggambarkan cara murid bereaksi secara emosional atau perasaan dan kemampuan mereka dalam merasakan penderitaan sesama murid saat situasi penerapan sistem kredit. Selain itu, kaitan konsepsi afektif dengan sistem kredit adalah pencapaian perkembangan kesadaran disiplin dan sikap, emosi dan perasaan. Untuk memperjelas prosesi taksonomi afektif, berikut adalah penjelasan dari taksonomi Bloom dengan kedisiplinan sistem kredit antara lain pertama, menerima yaitu tingkat terendah siswa pasif menimba perhatian dari penerapan kedisiplinan sistem kredit. Tanpa tingkat ini belajar tidak dapat terjadi. Kedua, menanggapi yaitu siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan disiplin, mereka bukan hanya hadir untuk stimulus, mereka juga bereaksi dalam beberapa cara menghadapi kedisiplinan sistem kredit. Ketiga, menilai yaitu siswa dapat menilai sistem kredit terhadap aplikasi kedisiplinan di sekolah ini. Keempat, pembudayaan yaitu dari penilaian siswa menimbulkan persepsi dalam skemata

¹⁶ Sri Esti W.D., *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 211

tersendiri dikalangan siswa. Sehingga mereka dapat membandingkan, menghubungkan serangkaian kejadian antara sebab – akibat dan mengelaborasi pribadi mereka atas apa yang telah terjadi atau telah dipelajari. Kelima, karakterisasi yaitu murid berprinsip tertentu atau berkeyakinan bahwa pemikiran disiplin adalah sesuatu wujud yang diberikan melalui sistem kredit yang diharapkan berpengaruh positif pada perilakunya sehingga menjadi pribadi berkarakter disiplin.

Dari kelima tahapan itu, dapat diproyeksikan dalam tinjauan afektif tujuannya bahwa penegakan norma kredit poin difahami untuk membentuk kebiasaan yang dibalut dalam sistem kredit poin. Sebagai sistem kedisiplinan – sistem kredit, diharapkan menstrukturasi murid menjadi disiplin melalui tahap menerima sistem kredit, menanggapinya, mengutarakan sikapnya pada kedisiplinan sistem kredit, kemudian disiplin menjadi karakteristik pribadi murid masing-masing, semoga.

5. Sekolah Sebagai Sistem Manusia

Sekolah sebagai manusia dapat di maknai sebagai upaya memanusiakan manusia. Upaya tersebut berkaitan dengan sistem yang berkesinambungan agar dapat menghasilkan individu-individu yang berkompeten. Ditambahkan pula oleh Richard I. Arends, yang menyebutkan bahwa:

“Sekolah adalah sistem manusia yang hubungannya bukan hanya oleh orang-orang yang belajar dan bekerja didalamnya tetapi juga oleh komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Sekolah adalah tempat individu-individu tidak bertindak dengan bebas

lepas sepenuhnya, tetapi dengan cara yang sedikit banyak interdependen dan dapat diprediksi”.¹⁷

Lebih lanjut dalam konseptualisasi sosiologis penelitian ini menggunakan teori tindakan fungsional atau lebih dikenal dengan sebutan teori sistem sosial, sebagaimana sekolah berfungsi sebagai sistem manusia yang mengembangkan masyarakat dalam bidang pengetahuan. Teori ini milik Talcot Parsons dalam karya yang berjudul *Working Papers in the Theory of Action*. Dalam karyanya sistem sosial bekerja dengan syarat (1) Adaptasi, (2) *Goal Attainment*, (3) Integrasi, (4) Latensi dan seterusnya disebut A,G,I,L. Elaborasi syarat tersebut menjadikan sekolah sebagai sistem manusia. Karena kedisiplinan sistem kredit membahas tentang bagaimana konsepsi norma kredit poin dalam mengembangkan pendidikan disiplin. Oleh sebab mekanisme tersebut sistem kredit perlu membahas salah satu konsep tersebut yakni latensi. Latensi adalah syarat pemeliharaan sistem sosial yang berfungsi mempertahankan pola mendisiplinkan siswa, dari tujuan perilaku institusi(*institutional behavior*) yakni sistem kredit. Sehingga perilaku institusi itu dapat memperkecil peluang toleransi pelaku indisipliner, menuju perilaku disiplin menjadikan kepribadian siswa.

Dari teori tersebut sangat berguna bagi sekolah yang mana sekolah adalah sistem manusia. Sebagai sistem manusia murid menempati konsep *self-monitoring* terhadap dunianya. Setelah melakukan penskoran jumlah kredit murid yang sering terlambat (*monitoring*) maka tahap berikutnya murid itu melakukan rasionalisasi

¹⁷ Richard I. Arends, *Learning To Teach II*. Terjemahan Helly P.S. & Sri M.S., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 145

antara dominasi ego dirinya terhadap otoritas guru yang berwenang, kemudian legitimasi dari kredit poin tersebut merupakan hasil dari kesepakatan diantara perbedaannya. Tinjauan teori dalam hal ini adalah A,G,I,L yang mempunyai tafsir menampakan sistem tindakan lengkap tentang rotasi kerangka berpikir, dijelaskan dalam gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1.
Sistem Tindakan Lengkap

A	Sistem organismik	Sistem kepribadian	G
I	Sistem kultural	Sistem sosial	L

Sumber: diadopsi dari Talcott Parsons dalam buku Jonathan H. Turner, Alexandra Maryanski. *Fungsionalisme*. Terjemahan Anwar Efendi. Hlm. 145

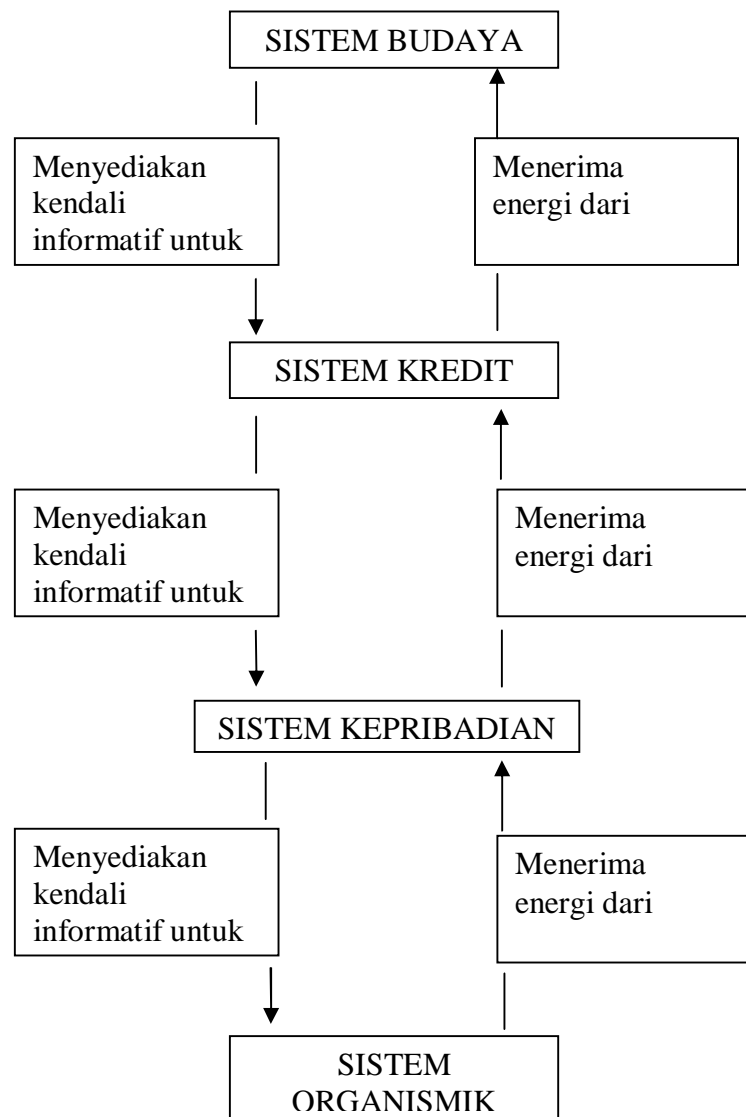
Dari perputaran roda A,G,I,L itu memang perselisihan tersebut adalah sebuah realitas hasil negosiasi dan pemaknaan antara kekuasaan guru dan refleksi murid yang dikemas secara sistemik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa pendidikan telah membudaya dan dapat digunakan juga sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas vertikal, berikut ini adalah Hierarki sibernetik kendali yang menunjukkan budaya sekolah dalam sistem kredit poin sebagai sistem sosial di sekolah.

Manajemen sebagai pengelolaan akan terlihat aspek rotasi A,G,I,L, baik dalam iklim sekolah, maupun agen pengelola kesiswaan yang langsung berwenang secara struktural di dalam sistem kredit poin. Sumber daya itu harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Oleh sebab biokrasi membutuhkan acuan sinergi positif untuk itu diperlukan konsepsi hierarki sibernatik kendali budaya sekolah. Hubungan sistem dalam struktur pembudayaan iklim sekolah yang harmonis

diharapkan menciptakan hukum sinergi positif untuk birokrasi pendidikan disiplin yang sehat, efisien dan efektif.

Pengelolaan manajemen memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Pembiasaan disiplin yang saling menghormati adalah salah satu konstituen birokrasi. Perilaku pembudayaan dalam konsepsi hierarki sibernetik kendali budaya sekolah dapat berinteraksi apabila guru bersedia mengendalikan informatif untuk murid patuh berdasarkan sistem budaya di sekolah yang didapat energi dari sistem kredit poin. Kemudian secara berkelanjutan kebiasaan akan menghasilkan *distinction* antara murid patuh dengan murid *ngeyel*. Dengan demikian buah dari birokrasi kedisiplinan ini adalah simbiosis mutualisme dalam iklim budaya sekolah, untuk lebih jelas peta konsepsi hierarki sibernetik kendali, lihat gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2.
Peta Konsep Hierarki Siberatik Kendali
Budaya Sekolah



Sumber: diadopsi dari Talcott Parsons dalam buku Jonathan H. Turner, Alexandra Maryanski. *Fungsionalisme*. Terjemahan Anwar Efendi. Hlm. 142

Dari gambar di atas terlihat bagaimana posisi sistem kredit poin pada dimensi budaya sekolah dalam struktur. Ini memiliki makna bahwa budaya sekolah kurang lebih sama dengan budaya komunitas lain atau budaya organisasi pada umumnya.

G. Metodologi Penelitian

Penggunaan metode penelitian adalah campuran kualitatif pada kuantitatif dengan model rancangan sekuensial, ditampakan dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif dari suatu situasi sosial di sekolah. Dalam situasi sosial di sekolah yang diteliti adalah penegakan sistem kredit poin dalam kedisiplinan murid dan konsepnya dalam mengembangkan pendidikan disiplin. Dalam penggunaan metode ini memiliki bekal teori termuat dalam kerangka konsep dan pembuktian khusus berupa penyebaran kuesioner untuk menyingkap motif perilaku pelanggar berdasarkan pengalaman pribadi mereka dan menganalisa tindak hukum dari penegakan kedisiplinan ini.

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan kunci yang dipakai adalah agen pendisiplinan sistem kredit, yakni wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan penyuluhan dan guru wali kelas. Dan sebagian lainnya, bersumber dari warga sekolah sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Informan kunci diperlukan untuk dapat mengetahui situasi birokrasi sistem kredit. Sedangkan informan tambahan diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi disiplin siswa pada jam sekolah.

2. Peran Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, banyak kelompok dari warga sekolah yang berpendapat suka dan sebagian lain tidak. Kegembiraan dari kelompok warga sekolah dapat dirasakan manakala sekolah terasa sangat disiplin, terutama agen kesiswaan. Sedangkan kelompok warga sekolah yang tidak senang, opini mereka sekolah hanya sekedar tempat singgah, tempat bermain dan tempat melakukan percobaan pencapaian jati diri.

Dari kontroversi tersebut, kerekatan subjektif telah banyak memberikan pengalaman dalam lokasi penelitian ini, yang mana peneliti sendiri mempunyai pengalaman di sekolah ini. Peneliti adalah alumni sekolah ini pada tahun 2006. Peneliti sendiri hanya berdomisili di Cipinang Muara selama dua tahun pada saat bersekolah, waktu yang cukup untuk mengenal situasi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat Cipinang Muara. Hal tersebut memudahkan peneliti untuk menganalisis sisi kedisiplinan di sekolah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek dalam mendapatkan hasil di lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Moh. Nazir mengatakan:

“metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik”.¹⁸

Dalam rangka mengumpulkan fail penelitian, mula-mula dilakukan observasi situasi sosial di sekolah ini. Dalam melakukan observasi, dapat diketahui sejarah pola kedisiplinan yang dijabarkan untuk mengetahui asal usul wewenang guru dalam tugas mendisiplinkan murid berdasarkan atas pengalaman pribadi murid yang bersekolah. Kemudian peneliti mengumpulkan data sekunder berupa data kesiswaan tahun 2009-2010 berupa poin pelanggaran SMA Negeri 50 Jakarta, data prestasi siswa secara umum dan data akademik siswa atau lebih dikenal dengan sebutan legger.

Setelah observasi usai dilakukan, peneliti mengadakan diskusi dengan beberapa orang yang terkait sistem kredit poin. Semua data yang terkumpul dicatatkan dalam *field note* (Temuan Penelitian). Catatan ini sangat membantu dalam rangka meneliti sistem kredit poin. Dari catatan ini dapat diketahui pelbagai realitas yang unik dan sistemik tentang kredit poin. Kemudian wawancara dengan informan kunci guna mengetahui pola kedisiplinan sistem kredit. Gambar juga diperlukan guna mevisualkan serangkaian kejadian yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

Setelah melakukan metode kualitatif yang digunakan secara simultan tersebut, kemudian peneliti menggunakan sebuah metode kuantitatif yakni pengumpulan kuesioner yang perlu dilakukan untuk mengkaji fenomena disiplin kredit poin tentang populasi pelanggar kedisiplinan yang terdapat pada legger(data nilai tiap murid) milik

¹⁸ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: GI, 1983, hlm.63

sekolah. Dari data itu diperoleh nama-nama murid responden senior di kelas XI dan XII dalam tahun ajaran 2009 – 2010, ketentuannya mereka tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM) dari mata pelajaran yang telah ditentukan dan telah terlambat dan / atau tidak masuk sekolah lebih dari sembilan kali (dua minggu) secara berkesinambungan maupun berturut-turut. Dari data itu dapat mengungkapkan hukuman yang diterima dan motif perilaku pelanggar berdasarkan pengalaman pribadi mereka.

H. Keterbatasan Penelitian

Penulis mengetahui bahwa sesuatu yang baik dari diri sendiri belum tentu baik bagi orang lain. Walaupun demikian penulis memiliki usaha keras untuk meminimalkan bias personal, dengan cara mengkonfrontir opini pribadi dengan murid di sekolah. Dengan demikian pandangan berbeda dapat diketahui, sehingga bias personal dapat diminimalkan, selain ini penulis juga membutuhkan kritik dan saran dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Dalam usaha ini selain hal tersebut juga dikembangkan dengan teori yang mendukung penulisan ilmiah. Dasar teori ini-lah yang dianalisis, kemudian dapat diketahui sisi-sisi penegakan sistem kredit poin sebagai upaya mengatasi bias personal. Adapun dari sudut pandang penulis yang terdapat dalam karya ini tidak berkenaan oleh sebab bias personal atau lain hal dengan apa adanya yang tertera di sini, penulis mohon bantuan kepada pembaca, supaya karya ini lebih baik.

I. Sistematika Penulisan

Dalam bab I adalah pendahuluan berisikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan ini. Semua ini diajukan di awal bimbingan skripsi sebagai sesuatu yang di sebut proposal skripsi. Tujuannya adalah mengetahui masalah penelitian ini dan kerangka teori yang digunakan.

Bab II adalah lokasi dan arena situasi sosial dalam penelitian. Ada dua sub bab dalam bab ini. Bagian awal adalah situasi sekolah. Membahas tentang kualitas akademik sekolah dan murid yang masuk perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan sebagai pencitraan sekolah. Bagian akhir adalah letak geografis dan situasi sekolah termasuk didalamnya asal usul norma kredit poin untuk murid.

Bab III mempunyai judul kredit poin dalam kedisiplinan murid. Bagian ini adalah temuan penelitian. Berisi tentang prosedur kedisiplinan sekolah dan penegakan kredit poin sebagai wewenang resmi untuk mengawasi murid. Oleh sebab bagian ini analisis jadi perlu dirincikan isinya. Bagian pertama adalah prosedur kredit poin yang membahas tentang mendisiplinkan murid. Bagian kedua adalah kredit poin sebagai wewenang resmi untuk mengawasi murid, bagian ini mengeksplorasi tentang penegakan kredit poin dalam rangka mendisiplinkan murid berdasarkan fenomena dari sistem kredit poin.

Bab IV mempunyai judul norma kredit poin terhadap pendidikan disiplin. Bagian ini adalah analisis penelitian. Terdiri dari tiga bagian, yang pertama adalah penilaian murid terhadap kredit poin yakni suatu kajian teori afektif dalam

pembelajaran. Berguna untuk menganalisa temuan penelitian dari sisi murid. Konsepsi dari sistem kredit ini dari sisi murid. Selain itu dapat diketahui juga yang mana sebagai jawaban lengkap dari pertanyaan penelitian ke dua, pada bagian kedua dan ketiga adalah fungsi manifest dan fungsi laten dari kredit poin.

Bab V adalah bagian akhir dari skripsi ini. Berisi tentang kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas. Dalam bagian akhir hanya ada kandungan pokok dari skripsi ini. Selain berfungsi dapat menjawab secara singkat dari pertanyaan penelitian, juga bisa sebagai laporan penelitian.

BAB II

KEADAAN SMA NEGERI 50 JAKARTA

A. Pengantar

Lokasi penelitian bukanlah sekedar tempat mengetahui situasi dan kondisi arenanya pada masa tertentu. Namun ada ekspresi dari situasi dan kondisi sosialnya yang memiliki efek samping yakni di mana lokasi perjuangan atau manuver terjadi untuk memperebutkan pertarungan politik dan akses terbatas. Arena dalam hal ini didefinisikan sebagai proses politik kredit poin; yang mana dianggap sebagai struktur disiplin murid.

Dalam bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang situasi model kedisiplinan. Dari bagian ini terdapat realitas kedisiplinan yang laten, sehingga terjadi pertautan politik dalam penegakan disiplin antara guru sebagai agen struktur yang mengatur secara konstituen terhadap murid. Bagian kedua adalah visi dan misi sekolah ini yang mana isi dari visi dan misi mencerminkan aturan disiplin murid secara normatif. Bagian ketiga adalah letak geografis dan situasi sekolah ini. Dalam bagian ini membahas tentang gambaran umum seputar sekolah ini dan asal usul norma kredit poin untuk murid membahas tentang asal usul mendisiplinkan murid.

B. Situasi SMA Negeri 50 Jakarta

Situasi kedisiplinan di sekolah ini pada tahun pembelajaran 2009/2010 adalah perbaikan dari kepala sekolah yang sebelumnya. Pada kepala sekolah sebelumnya menerapkan pola kedisiplinan searah dengan pendekatan personal kepada murid, kemudian oleh kepala sekolah era ibu Hj. Nur Hidayati, kedisiplinan dibuat secara sistemik yang bernama sistem kedisiplinan kredit poin. Dan diharapkan oleh kepala sekolah tersebut dapat terus dilakukan dengan manajemen yang lebih baik. Cara yang dapat dilakukan ada dua, yakni mempertahankan pola agen dalam menangani pendidikan disiplin dan pengelolaan ketengangan dalam arena iklim sekolah supaya belangsung kondusif terus-menerus.

1. Kualitas Akademik Sekolah

Sekolah ini mempunyai beberapa prestasi, ciri prestasi sekolah ialah bahwa sekolah mendapat penghargaan sebagai bukti juara berupa piagam atau piala dari suatu perlombaan kokulikuler maupun ekstrakulikuler. Prestasi yang diraih mayoritas dari perlombaan ekstrakulikuler. Hal ini tampaknya makin menonjol, karena bagi murid yang berbakat dalam ekstrakulikuler tertentu didukung oleh fasilitas yang ada. Beberapa ekstrakulikuler yang populer makin sering menunjukkan eksistensinya. Kebiasaan yang hampir tak berubah dapat dikonsepsikan etos murid untuk meningkatkan prestasi lebih berkembang.

Dalam data kesiswaan tertulis prestasi karate termasuk ekstrakulikuler(ekskul) yang populer dikalangan murid, dengan jumlah prestasi sebanyak lima kali juara.

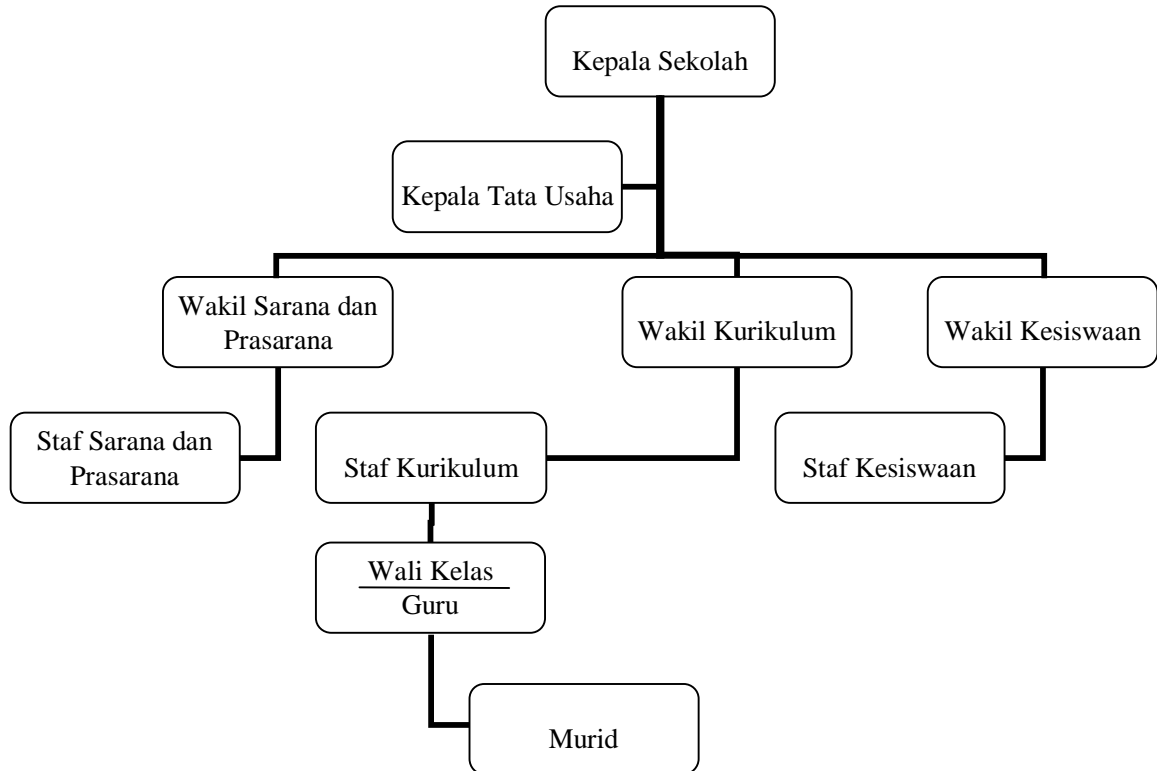
Dibandingkan dengan ekskul lain yang populer juga seperti basket dan futsal namun kurang berprestasi meskipun fasilitasnya tersedia, boleh jadi kompetitor lain yang lebih unggul. Sedangkan untuk juara kokulikulernya cukup beragam yakni MTQ juara satu dan *runner-up* dan khotib juara satu se-jakarta timur dalam kurikulum agama Islam pada tahun 2009, juara dua membaca puisi dan juara skenario teater dalam kurikulum bahasa Indonesia dan juara satu cepat tepat rokris dalam kurikulum agama Kristen pada tahun 2009.¹

C. Letak Geografis dan Kondisi SMA Negeri 50 Jakarta

Keberadaan SMA Negeri 50 Jakarta terletak di jalan PLN Cipinang Muara wilayah Cipinang Muara, Jatinegara – Jakarta Timur. Sekitar lingkungan sekolah, struktur sosial dan ekonomi masyarakat masuk dalam daerah kampung betawi, di depan sekolah terlihat pemandangan sungai Cipinang yang tepat terletak di depan sekolah. Masih dalam tempat yang sama, pada bagian kanan sekolah terdapat *home industry* pabrik tahu, bagian kiri adalah sekolah dasar negeri dan di belakang sekolah terdapat gelanggang olahraga – Jatinegara.

¹ Sumber: Data kesiswaan SMA Negeri 50 Jakarta

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi SMA Negeri 50 Jakarta



Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Kondisi struktur tersebut adalah gambaran umum dalam pembagian kerja. Dalam pembagian kerja untuk guru mata pelajaran, pembelajaran memiliki situasi ruangan kelas yang bersistem *moving class* yang mana sistem ini menerapkan proses pembelajaran berpindah-pindah ruangan sesuai dengan mata pelajaran dan jadwal yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Tentang jumlah ruang kelasnya keseluruhan berjumlah 21 kelas yang terdiri dari ; kelas X ada 7 kelas, kelas XI IPA ada 2 kelas, kelas XI IPS ada 5 kelas, kelas XII IPA ada 2 kelas dan kelas XII IPS ada 5 kelas.

Gambar 2.2.
SMA Negeri 50 Jakarta



Sumber: dokumentasi peneliti, 2010

1. Asal Usul Norma Kredit Poin Untuk Murid

Sistem kredit poin pada awalnya berdiri untuk memberikan watak murid yang diperlihatkan secara konsisten dan konsekuen, yang menyebabkan perangnya memiliki identitas yang berbeda dari pada orang tak terpelajar. Para murid diajarkan untuk memiliki perilaku disiplin supaya mereka mempunyai perilaku bertanggungjawab, paling tidak soal waktu dalam hal ini murid yang terlambat misalnya. Sebelum penerapan kredit poin dari tahun 2004 pak Eko selaku wakil kepala sekolah mengemukakan:

“Sebelum tahun 2004 sekolah mulai banyak diterapkan kedisiplinan untuk meminimalkan kasus pelanggaran disiplin mulai dari penanganan secara mendidik misalkan anak yang terlambat dimasukkan ke perpustakaan untuk membaca buku atau menulis dari buku yang dianggap perlu namun disalahgunakan murid, mereka lebih senang terlambat daripada dihukum seperti itu”.²

² Wawancara dengan Pak Eko pada tanggal 23 Juli 2011.

Sebelum tahun tersebut dilakukan upaya kedisiplinan murid seperti membersihkan sampah sekolah, masuk perpustakaan, baris di penelitian dan pembinaan fisik namun semua itu dinilai para eksekutif sekolah tidak efektif dan efisien. Selanjutnya pak Eko mengemukakan “gagasan kredit poin bermula dari dinas pendidikan. Sehingga semua sekolah di DKI Jakarta diharapkan dapat menerapkannya”.³

Dalam penerapan disiplin masuk pada pertama kali adalah hukuman bagi murid yakni memungut sampah bagi yang terlambat. Mula-mula murid terlambat dibariskan di penelitian sekolah kemudian dinasehati supaya tidak terlambat lagi di kemudian hari, lalu para murid dihukum membersihkan sampah di sekolah karena terlambat datang ke sekolah. Namun cara ini di nilai tidak efektif karena murid yang seharusnya membersihkan sampah justru jajan di kantin sekolah dan ditenggarai tidak mengindahkan aturan ini.

Masuk perpustakaan adalah hukuman kedua setelah hukuman pertama gagal mendisiplinkan murid. Murid terlambat, masuk perpustakaan diberi tugas untuk membaca buku sambil menunggu jam kelas pertama usai. Cara ini pun tak efektif murid di perpustakaan justru tidur yang mana sudah tentu tidak mengindahkan aturan ini.

Pembinaan fisik adalah peraturan ketiga setelah dua peraturan tersebut gagal ditegakan untuk mendisiplinkan murid yang hanya dari sisi keterlambatan murid. Dengan cara ini sekolah berharap murid dapat tertib masuk sekolah. Cara ini adalah

³ Wawancara dengan Pak Eko Pada tanggal 23 Juli 2011.

hukuman berbentuk fisik seperti lari beberapa kali mengelilingi lapangan sekolah. Namun ada keberatan dari orang tua murid karena dalam penerapan aturan ini, anaknya pingsan karena kelelahan dan menderita penyakit tertentu. Dari desakan orang tua murid upaya mendisiplinkan dengan cara ini pun gagal ditegakan.

Kredit poin muncul dari kepala sekolah pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa ada himbuan dari dinas pendidikan setempat untuk menerapkan sistem kredit poin demi ketertiban sekolah di DKI Jakarta. Dari sinilah asal usul aturan kredit poin untuk mendisiplinkan murid di sekolah ini. Namun seiringnya waktu berlalu ternyata banyak kelemahan dari sistem kredit poin ini, karena sistem ini terlalu banyak mengatur perilaku murid dalam klasifikasi terlampir. Diantaranya adalah cara berpenampilan, gaya hidup dan lain-lain. Selain hal tersebut sistem kredit poin dalam praktiknya juga banyak disalahgunakan murid. Penerapan sistem kredit poin seharusnya bagi murid yang melakukan pelanggaran mengisi nama yang bersangkutan sendiri dalam kartu pelanggaran murid (*Quality Control*) yang dicatatkan pada rekap kredit point pelanggar, namun mereka menggunakan nama temannya. Sehingga banyak murid yang tak melanggar ketentuan tata tertib justru mendapat poin gara-gara ulah temannya itu. Kondisi ini lalu diperbaiki sistemnya bagi pelanggar ketentuan tata tertib langsung dicatatkan poin dari wali kelas jadi kali ini tidak ada kartu pelanggaran murid. Sesuai dengan pernyataan ibu Dewi selaku guru bimbingan penyuluhan yang memberi alasan penyebab tiada kartu pelanggaran

lagi dengan menyatakan bahwa "... Kartu sering dipake siswa-siswa buat bohong. Di kartu tuh mereka tulis nama temannya yang justru gak ngelakuin kesalahan gitu".⁴

D. Rangkuman

Kondisi citra dari sekolah ini cukup bagus. Terlihat dari beberapa prestasi akademik dan prestasi ekstra kulikuler tertentu. Sekolah ini juga menerapkan prinsip disiplin, yang mana terdapat pada pintu awal ketika akan naik ke lantai dua. Prinsip ini bertulisan disiplin adalah kunci kesuksesan. Untuk itu perlu adanya pengakuan dari prinsip tersebut.

Prinsip kedisiplinan diaplikasikan dalam bentuk norma kredit poin. Bagian ini adalah konstituen dari skripsi ini. Sebagaimana pendidikan disiplin murid di sekolah ini diharapkan patuh pada penerapan kredit poin, yang mana kunci dari kesuksesan yang telah dicapai. Oleh sebab adanya hubungan antara prinsip sekolah tersebut dengan peningkatan kualitas belajar yang tercermin pada prestasi murid karenanya skripsi ini dibuat.

⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi(guru bimbingan penyuluhan). Selasa, 16 November 2010

BAB III

KREDIT POIN DALAM KEDISIPLINAN MURID

A. Pengantar

Kredit poin adalah sistem kedisiplinan di sekolah ini. Sistem kredit poin dirancang mempunyai tujuan untuk mendisiplinkan murid. Seperti yang telah dikemukakan pada kerangka teori bahwa disiplin bukan hukuman melainkan saling menghargai, konsekuensi logisnya hukuman diganti dengan tindakan bersungguh-sungguh.

Sebagai contoh kasus keterlambatan murid misalnya, dalam rangka mendisiplinkan murid dituntut menghargai kebijakan sekolah berbentuk aturan kredit poin. Apabila mereka yang tidak mengindahkannya murid akan dituntut untuk menghargai aturan sekolah berupa pemanggilan orang tua atau wali mereka. Proses pemanggilan orang tua atau wali mereka adalah bentuk interupsi dari kasus keterlambatan, karena regionalisasi jam sekolah dalam wewenang kontrol pihak sekolah.

B. Sanksi Kredit Poin Dalam Konteks Disiplin

Penerapan kedisiplinan tentu ada penegakannya dari aturan poin-poin sistemik (terlampir). Masalah yang saling terkait dalam sistem ini adalah disiplin dan hak-hak murid. Menurut Kujoth Jean S menunjukkan bahwa hasil penelitiannya:

“sanksi berupa hukuman fisik tidak dapat efektif menanggulangi supaya murid patuh pada kedisiplinan sekolah, mereka justru yang diberikan tindak kekerasan dalam sekolah pada tempo yang akan datang melakukan hal kekerasan yang pernah dialaminya kepada sesamanya tanpa alasan yang jelas. Jika kebutuhan yang dasar dari cinta kasih, sayang, menghormati, kepercayaan, pengetahuan dan kebenaran dari kejujuran tidak terpenuhi, anak-anak mungkin menunjukkan perilaku mengganggu”.¹

Penerapan kredit poin adalah salah satu sistem penegak disiplin yang bersifat positif. Mensosialisasikan kebutuhan dasar tersebut, berarti murid bertanggung jawab dan terlibat pribadinya untuk bersikap disiplin. Dalam rangka mensosialisasikan disiplin positif murid perlu diperlakukan dengan cara gembengan, empati dan konsisten mengacu pada aturan sekolah supaya sesuai dengan harapan pendidikan karakter. Biarkan murid tahu ini adalah perilaku sosial yang menyadarkannya bahwa perilaku sosial adalah penting bagi kehidupan sehari-hari. Kapan murid melihat kelakuan baik, dia dapat mengakui itu. Proporsional perilaku sosial positif dapat disambut dengan anggukan, senyum atau “acungan jempol” akan memperkuat kelakuan positif murid. Sebagai contoh dari murid yang biasanya terlambat guru dapat menyambutnya secara proporsional tersebut “bagus ada kemajuan kualitas hidup kamu menjadi disiplin” sambil mengajungkan jempol dari guru piket, misalnya.

C. Kredit Poin Sebagai Wewenang Resmi Untuk Mengawasi Murid

Adalah hal wajar dan telah umum bahwasanya birokrasi dalam sekolah telah terstrukturasi. Tentang struktur kredit poin ini, secara sistematis wewenang resmi

¹ Jeanne H. Ballantine, *The Sociology Of Education A Systematic Analysis*. New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall Inc., 1983 hlm. 47

diberikan kepada dua pejabat sekolah yakni guru wali kelas dan guru bimbingan penyuluhan sebagai agen pengawas dan kontrol perangai murid. Situasional yang kondusif adalah misi konstituen dari penegakan sistem ini.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan guru dan staf sekolah mengawasi secara ketat. Dalam pengawasannya orang tua murid juga turut serta membuktikan bahwa anaknya sedang bersekolah, biasanya cara para orang tua menelpon sekolah atau langsung menghubungi wali kelas anak yang bersangkutan. Walaupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dapat wewenang resmi dari kepala sekolah untuk menegakan sistem ini namun pada kenyataannya sistem ini tidak dapat serta merta menjatuhkan hukuman kepada murid yang bersangkutan. Dalam contoh kasus murid merokok; murid dapat kooperatif, seorang murid merokok tidak dapat terbukti apabila tidak tertangkap tangan. Anak yang bersangkutan dan teman-temannya biasanya tidak mengaku sebagai saksi apabila “si Fulan” yang merokok, walaupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dapat mencium bau khas rokok. Biasanya hal itu terjadi di lantai teratas pada murid senior. Lain hal jika kasusnya keterlambatan murid, menurut Izu (bukan nama sebenarnya) “keterlambatan tidak dapat di tolerir dan langsung dapat di tindak secara tegas. Sebab keterlambatan mempunyai bukti fisik yang aktual”.²

Peristiwa disiplin dalam hal di atas adalah tempat diterapkannya pengawasan dan kuasa disiplin tidaklah seperti di penjara. Dalam rentang arena di sekolah barangkali menunjukkan karakter instutisional masyarakat modern layaknya

² Wawancara dengan Izu(murid berpengalaman tentang sistem kredit poin). Selasa, 16 November 2010

organisasi-organisasi pemejaraan. Pemisahan ruang-waktu berbagai sektor kehidupan sosial mungkin sejatinya adalah syarat beroprasinya kuasa disiplin dalam skala yang luas. Murid hadir di sekolah hanya untuk waktu tertentu. Di samping itu, saat berada di sekolah, disiplin sering kali diawasi ketat hanya selama periode tertentu yang dianggap sebagai ‘jam pelajaran’. Anthony Giddens yang diterjemahkan oleh Maufur dan Daryanto mengatakan “tidak ada keraguan bahwa kuasa disiplin bisa diperoleh hanya dengan ‘memasukan’ manusia ke dalam latar fisik tertentu”.³ Pada saat pribadi remaja menjadi murid SMA, dia harus ikut aturan sekolah salah satunya mengindahkan kedisiplinan kredit poin yang secara bertahap akan mendidiknya mempunyai pribadi disiplin.

Kewenangan dalam kuasa ruang-waktu tertentu dalam sistem kredit poin dapat dimanajemenkan secara terstruktur atau dalam bahasa Weber menyebutnya dengan sistem disiplin birokrasi. Sebagaimana struktur sosial terbagi secara sistematis baik agen maupun aktornya. Agen penegak sistem kredit poin dapat mengatur murid melalui wewenang resminya, dari itulah penanganan tata tertib sekolah dapat diberlakukan.

Sirinam S. Khalsa mengatakan “wewenang dalam konteks pendidikan disiplin yang lebih luas ialah guru yang mengajar, menjadi pelatih, dan memandu yang mengandalkan kecakapan dan kebijaksanaan”.⁴ Ada beberapa konteks wewenang berbeda dalam pendidikan di arena yang berbeda. Sekolah memiliki pendidikan

³ Anthony Giddens, *Op Cit*, hlm. 236 – 237.

⁴ Sirinam S. Khalsa, *Pengajaran Disiplin & Harga Diri*, terjemahan Hartati Widyatuti. Jakarta: Indeks, 2008, hlm. 61

disiplin berbeda antara penjara maupun akademi militer, karena alat pendisiplinannya juga berbeda. Siswa mempunyai hak dihormati bukan penghormatan layaknya struktur kepangkatan militeristik di akademi militer, misalnya. Disiplin mikro di kelas khususnya, diperlukan pendekatan berupa peringatan lunak inilah sebabnya para guru di SMA ini begitu tenang yang mana bertujuan mengakhiri perilaku buruk. Tingkat perilaku buruk di sekolah dapat menentukan iklim sekolah. Menuju iklim sekolah yang kondusif, ibarat permainan catur yakni apabila antara sistem penyerangan dan pertahanan tidak seimbang, boleh jadi kebobolan yang dapat menyebabkan berkurang bidak catur. Maka semakin sedikit bidak catur yang dimiliki, semakin sedikit pula peluang untuk memenangkan pertandingan. Di mana semakin banyak kerja sama warga sekolah maka semakin harmonis iklim sekolah, inilah pertahanan latensi di sekolah yang diharapkan, semoga.

Sesuatu pembeda antara disiplin dan hukuman adalah disiplin positif yang terus dapat dilakukan pada pendidikan disiplin. Beberapa kali kejadian di SMA ini guru berkata ketika mengingatkan murid dengan kata-kata seperti, “Kamu masih gini-gini aja, remed melulu looh” atau seorang guru yang pernah bertaruh pada murid “jikalau kamu lulus tahun ini, saya akan bayar kamu satu juta. Bilamana sebaliknya kamu tidak lulus tahun ini kamu bayar saya seratus ribu”.⁵ Pengharapan murid janganlah dianggap remeh karena itulah kekerasan psikis guru kepada murid yang bersangkutan. Tabel 3.1 memperlihatkan sejumlah perbedaan antara penggunaan disiplin dan penghukuman.

⁵ Wawancara sambil lalu kepada guru matematika(AK)

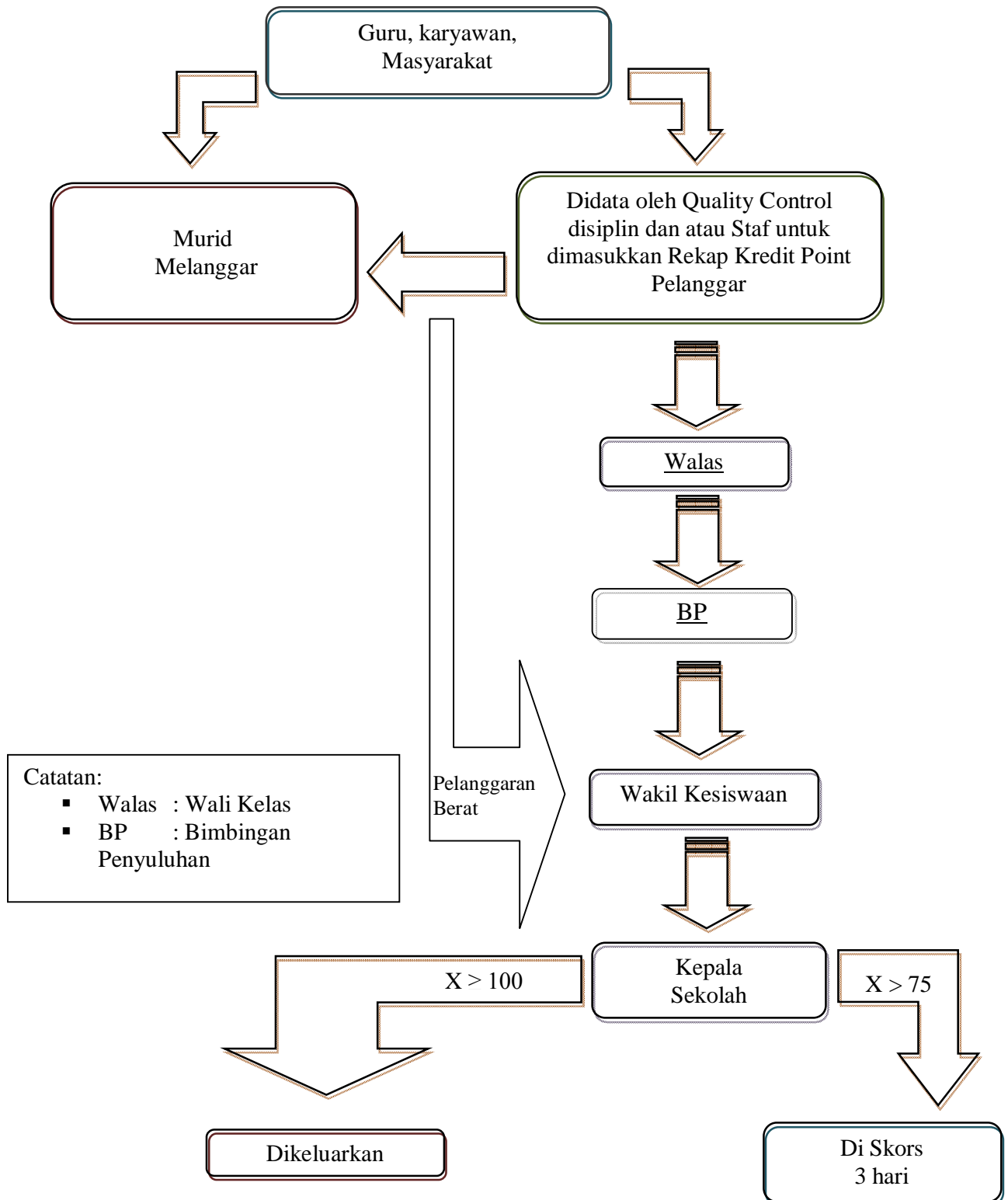
Tabel 3.1.
Perbedaan Antara Penggunaan Disiplin dan Penghukuman

Disiplin	Penghukuman
Mendidik siswa	Memarahi siswa
Menitikberatkan akibat logis	Memaksakan akibat yang dibesar-besarkan dan tidak berkaitan
Fokus pada perilaku prososial	Fokus pada perilaku buruk
Meningkatkan disiplin diri	Mengganggu kemampuan belajar

Sumber: Sirinam S. Khalsa, *Pengajaran Disiplin & Harga Diri*, terjemahan Hartati Widyatuti. Jakarta: Indeks, 2008, hlm. 32

Sasaran pendidikan disiplin yakni meningkatkan disiplin diri. Kredit poin menerapkan peningkatan disiplin diri. Warga sekolah berinteraksi sesuai struktur yang tetap, terus berulang-ulang waspada untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban, hal ini akan mampu membantu warga sekolah melatenkan keharmonisan iklim sekolah. Untuk mempertahankan pola dari tujuan yakni meminimalkan peluang toleran dan pengelolaan ketegangan antara unit sistem; pejabat sekolah, guru, murid dan tenaga kependidikan atau sering disebut warga sekolah.

Gambar 3.1.
Jenjang Penanganan Tata Tertib Murid



Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

1. Kontrol Agen Ganda

Kewenangan dalam sistem kredit poin dikonstruksikan dalam norma dan sanksi dalam kekuasaan yang mana terjadi komunikasi dalam ruang dan waktu sebagaimana tergambar di atas. Talcott Parsons⁶ mengemukakan bahwa “Legitimasi dari pengawasan tersebut (seperti sistem kredit poin) mempunyai arti yang penting untuk kedudukan kekuasaan dalam masyarakat (warga sekolah) dalam hubungannya dengan sistem tujuan-tujuannya”. Sedangkan, Miriam Budiarjo mengatakan:

”Secara eksplisit ataupun implisit, keputusan itu selalu mempunyai makna otoritatif atau berwenang dengan kata lain keputusan-keputusan itu dilegitimasi (dibenarkan atau diabsahkan) oleh kedudukan institusional dari pelakunya, ataupun keputusan-keputusan itu diberi sanksi institusional oleh masyarakat (agen penegak kredit poin atau pejabat sekolah) yang bersangkutan”.⁷

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada dua pengawas yang berwenang secara absah mengawasi dan mengontrol murid dalam sistem kredit poin. Dalam fungsinya pengawas terdapat dalam tabel 3.1 di bawah ini.

⁶ Talcott Parsons dalam buku Jonathan H. Turner, Alexandra Maryanski. *Fungsionalisme*. Terjemahan Anwar Efendi. Hlm. 148

⁷ Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1991, hlm. 32 – 33

Tabel 3.2.
Fungsi Pengawas dan Pengkontrol
Sistem Kredit Poin

Tindakan Wali Kelas	Tindakan Guru Bimbingan Penyuluhan
Apabila murid tertangkap tangan melanggar kedisiplinan maka dicatatkan kredit poin kemudian ditindaklanjuti berupa sanksi pemanggilan orang tua atau wali murid dengan surat pengantar dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.	Mendapat laporan dari wali kelas kemudian ditindaklanjuti dalam program bimbingan penyuluhan murid. Begitu pula bila mana murid tertangkap tangan melanggar kedisiplinan akan masuk dalam program bimbingan penyuluhan murid.
Pencatatan kredit poin dari guru piket dan pengamatan wali kelas sendiri, kemudian ditindak tegas. Biasanya murid yang melanggar kedisiplinan diberikan ceramah berupa informasi dan teguran supaya tidak mengulangi pelanggaran disiplin.	Dari pemanggilan orang tua yang anaknya terkena sanksi kredit poin ditindaklanjuti dengan cara diberikan penyuluhan tentang sanksi bila murid yang bersangkutan mengulangi pelanggaran kedisiplinan dan / atau melakukan pelanggaran kedisiplinan lainnya.

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Dalam pelanggaran disiplin ada faktor-faktor sosial-struktural dan psikologis yakni dalam ruang waktu interaksi sesama murid. Fenomena ini dapat terjadi sebab kenakalan mereka sendiri, mayoritas kasus yang muncul adalah ancaman dari ketua kelasnya sendiri bahwa temannya melakukan pelanggaran kedisiplinan. Tekanan seperti ini biasanya terdapat pada mereka yang menduduki kelas XI atau kelas XII. Kejadian tersebut dalam tindakan pengawasan secara tidak langsung yang mana ketua kelas menjadi kepanjangan tangan dari agen yang berwenang, mengembangkan hal tersebut wali kelas bertindak mengkonfrontasikan beberapa pendapat dari murid yang terkait masalah dalam suatu kasus. Berdasarkan dari hasil konfrontasi itu dapat ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam aturan kredit poin.

2. Penegakan Agen Dalam Sistem Kredit Poin

Sistem kredit poin dilakukan secara konsisten oleh kedua agen tersebut. Terlihat dalam tiga aspek dalam sistem ini yakni: pertama, struktur sosial dan determinasi iklim sekolah. Kedua, pendekatan nilai afektif murid dan ketiga, perubahan dari hasil sistem kredit poin secara eksplisit. Aspek pertama bertautan dalam teori struktural sebagaimana semakin banyak aturan yang dibuat dan ditetapkan sistem tersebut, maka semakin formal pula sistemnya demikian sebaliknya – semakin sedikit aturan yang dibuat, sistem tersebut semakin tidak formal. Dalam terlampirnya banyak aturan sistem kredit poin dengan demikian maka semakin formal sistemnya. Aspek kedua bertautan dalam klasifikasi teori afektif Bloom, murid seharusnya mematuhi aturan sekolah yang tertuang dalam sistem kredit poin karena murid adalah bagian dari sistem tersebut.

Tujuan membina dan mendidik dalam klasifikasi ini diantaranya menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan emosi manusia lain, mengerti dan menerima kekuatan serta kelemahan sendiri, menunjukkan kerajinan, disiplin diri dan ketepatan waktu selain itu hasil dari aturannya berupa pengalaman pribadi yang mengairahkan keseimbangan otak kiri dan kanan murid yang bersangkutan dan berfungsi membantu memecahkan suatu masalah sosial. Aspek ketiga selain dari pengalaman pribadi tersebut, lingkungan turut andil dalam hal ini meliputi semua elemen di luar sistem yang bertautan langsung terhadap keberadaan sistem. Beberapa hal tentang pengganggu iklim sistem ini adalah satuan pengamanan atau biasa disebut SATPAM

yang korup, kenakalan remaja karena pergaulan di luar sekolah dan iklim sekolah terkadang kurang disiplin karena kemalasan agen yang berwenang.

Solusi dari masalah-masalah tersebut dapat dengan mudah teratasi dari dan untuk penegakan agen dalam sistem kredit poin, bilamana mereka sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem yang harus saling bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan fungsi agen itu sendiri, bila pembudayaan itu terjadi niscaya terciptalah iklim sistem kredit poin yang kondusif tentram. Disinilah posisi harkat dan martabat agen sebagaimana pentingnya identitas pribadinya sebagai agen ini. Ketika sepotong besi dipadukan dengan besi lain maka perpaduan besi tersebut bisa menjadi sebuah mesin yang berbeda dengan mesin lainnya. Ahmad Sobirin mengatakan:

“Jika beberapa suara diarsir maka jadilah sebuah lagu yang berbeda dengan lagu lainnya. Demikian juga jika sekelompok manusia diorganisir untuk melakukan kegiatan maka jadilah sekelompok manusia tersebut entitas sosial yang berbeda dengan entitas sosial yang lainnya”.⁸

Begitulah analogi iklim sistem ini, perlu diorganisir secara bersinergi dan berkolaborasi antara agen dan lingkungan dalam sistem tersebut. Sehingga dapat menyukseskan sistem yang demikian terorganisir konsisten.

Maksud dari sistem yang perlu diorganisir secara bersinergi dan berkolaborasi antara agen dan lingkungan dalam sistem tersebut sejalan pada konsepsi yang dikemukakan T. Parsons tentang fase syarat fungsionalisme, *AGIL; Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*. Elaborasi syarat-syarat tersebut perlu dilaksanakan seperti yang dikemukakan bapak Suwignyo disela-sela jam istirahat sekolah:

⁸ Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007, hlm. 10

“Dikiranya mereka(wali kelas dan staf) itu saya kerjanya hanya main catur saja padahal gak gitu posisi jabatan saya sebagai staf kesiswaan, saya junjung betul karena percuma’kan bikin peraturan kalo gak ada implementasinya”.⁹

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisa satu per satu dari konsep A,G,I,L, bapak Suwignyo itu tahu adaptasi lingkungan dalam waktu jam pelajaran pada saat kapan dan di mana mengawasi langsung perangai murid dalam perkembangan penegakan kredit poin kemudian mendistribusikannya ke lingkungan sekolah seperti satpam. Sigmund Freud dalam Ferdinand Zaviera mengatakan “hal integrasi kurang mempertahankan interelasi yang koheren untuk bersinergi dan berkolaborasi antara agen yang mana diantara agen ini mayoritas kaum hawa secara psikis lebih mementingkan dan menghayati perasaan atau ego”.¹⁰

Dalam pencapaian tujuan semua sistem tindakan harus menetapkan tujuan, memberikan prioritas dan mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai kedisiplinan. Disinilah peran aktif para agen untuk menegakan kedisiplinan. Menurut Jonathan H. Turner yang diterjemahkan oleh Anwar Efendi “terakhir adalah latensi yaitu semua sistem tindakan harus: (a) menghasilkan satuan-satuan penggunaan yang bisa cocok dengan sistemnya (masalah ‘mempertahankan pola’) dan (b) mengurangi ketegangan

⁹ Pernyataan bapak Suwignyo staf wakasek. Bid. Kesiswaan, Senin 6 Desember 2010

¹⁰ Asumsi ini sejalan dengan apa yang dikatakan Sigmund Freud, Penolakan remaja putri untuk diet sebenarnya adalah bentuk penolakan mereka terhadap pertumbuhan seksual yang mereka alami. Selain hal tersebut menurut pengalaman penulis misalnya fenomena pada saat keadaan dalam gerbong kereta api atau bus kota, wanita cenderung menolak berdiri pada saat ia duduk, untuk memberikan tempat duduknya kepada seseorang yang lebih prioritas atau mereka tidak akan bergantian berdiri dengan yang berada didepannya dalam kondisi apapun dan jarak sejauh apapun, kecuali mereka akan turun. (lihat Ferdinand Zaviera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, 2008, hlm. 100)

dalam unit sistem itu (pengelolaan ketegangan” atau intervensi iklim sekolah)”.¹¹ Hal tersebut dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

D. Melestarikan Sistem Kredit Poin

Pada umumnya, agen menggunakan dua cara dalam melestarikan budaya sistem kredit poin secara laten sejak tahun 2004 yaitu cara-cara formal sesuai dalam pernyataan huruf (a) tersebut dan cara-cara informal sesuai dalam pernyataan huruf (b) tersebut. Dalam praktik kedua cara tersebut biasanya dijalankan secara bersamaan yang berfungsi untuk mengalokasikan guru piket dan staf aparatus, perlunya sistem kedisiplinan dan pengambilan keputusan yang bagus kepada murid, perlunya hukum(ketentuan sanksi bagi pelanggar aturan kredit poin) yang mampu meredam konflik.

1. Melestarikan Penegakan Agen

Dalam Sistem Kredit Poin Secara Formal

Pada sekolah ini relatif pro keharmonisan iklim sekolah dalam rangka menegakan sistem kredit poin secara formal. Karena telah memiliki pengalaman dari proses pembentukan sistem kredit poin, diantaranya adalah mencontohkan kepada para murid dalam aksi bersemboyan “disiplin mulai dari saya” dan “saya bangga datang di sekolah tepat waktu” yang mana para guru menggunakan absensi *finger*

¹¹ Jonathan H. Turner, Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme*, Terjemahan Anwar Efendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 132 – 133

print untuk menunjukkan kepada murid bahwa disiplin pribadi adalah penting bagi kehidupan mulai saat ini sampai esok nanti untuk masa depan lebih baik kelak. Sebagaimana peribahasa mengatakan “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” mempunyai arti bahwa kelakuan murid selalu mencontoh guru. Dari peribahasa itulah para guru yang mana tidak hanya pemegang jabatan wali kelas dan guru BP. Sajalah yang notabenehnya agen penegak kredit poin, bahkan tidak tanggung-tanggung semua guru, satpam, pedagang di kantin, apalagi kepala sekolah untuk melestarikan sistem ini harus mensosialisasikannya sebagaimana warga sekolah yang baik.

Budaya “malu” adalah akar prinsip yang dipegang teguh institusi pendidikan ini. Kedisiplinan ala formalisasi dapat melestarikan penegakan agen, dalam aspek pro keharmonisan iklim sekolah dalam rangka menegakan sistem kredit poin selain memotivasi murid dengan cara tersebut dengan peraturan poin-poin yang telah ditetapkan itu merujuk pada teori *Conditioning Reflect* dari sisi psikomotorik menyatakan bahwa murid akan takut secara lahiriah dengan berbagai refleksi dan reaksi emosi, ketakutan, cinta dan marah yang manusiawi. Dengan demikian sifat manusiawi tersebut berkembang lalu terbentuk sistemik dari stimulus menuju respon melalui proses pengkondisian perangai pribadi. Dari teori tersebut dapat diketahui bilamana murid mempunyai skor dalam aturan kredit poin maka murid kemudian menjadi malu dan takut dikenakan sanksinya. Sehingga kredit poin dapat berfungsi mendisiplinkan murid, oleh sebab efek jera yang dihasilkan dari sistem kredit poin. Penelitian penegakan disiplin pernah dilakukan oleh Susi Widyaningsih dalam skripsinya mayoritas dilakukan dengan cara-cara formal. Hal ini dapat terlihat dalam

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitiannya, seperti sopan santun, pakaian seragam, kehadiran murid, pelaksanaan 5K, catatan pelanggaran pemeliharaan buku perpustakaan dan tugas yang diberikan guru. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kedisiplinan karismatik sang guru wali kelas, juga guru BP. Dan kepala sekolah yang statusnya adalah agen yang dapat menentukan murid melakukan tindakan indisipliner atau tidak.

Para murid diharapkan kooperatif dalam kedisiplinan di sekolah. Jika mereka melakukan tindakan indisipliner menjadi malu. Hal tersebut dapat dideskripsikan dari cara pandang agen(wali kelas) yang disimbolkan bahwa dia memiliki kewenangan untuk memberikan poin pelanggaran murid atau tindakan langsung menghukum karena tertangkap tangan. Hal tersebut terjadi pada saat pemotongan rambut oleh aparatus yang mempunyai kebijakan bahwa “rambut panjang menyentuh daun telinga dan kerah baju dan atau panjang rambut depan melebihi alis mata, dipotong itu rambut oleh petugas.

Gambar 3.2.
Penegakan kedisiplinan
Dalam aturan poin pelanggaran No. B7



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2010

Pada tanggal 15 Maret seminggu sebelum ujian sekolah tiba, para aparaturs melakukan penegakan kedisiplinan tentang cara berpenampilan dalam aturan kredit poin nomer: B.7. Pemotongan rambut dilakukan oleh wakabid. Kesiswaan beserta seorang staf-nya dengan memberikan pilihan kepada para murid yakni apakah mau dipangkaskan di tempat (sekolah) atau murid yang bersangkutan ke tempat potong rambut untuk memangkas rambutnya di pangkas rambut terdekat yang berada \pm 100 meter dari sekolah, sebagaimana supaya rambutnya sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Pagi itu beberapa murid tertangkap tangan berpenampilan memiliki rambut panjang yang mana tidak sesuai dengan ketentuan dari sistem kedisiplinan sehingga perlu penegakan kedisiplinan. Dalam penegakan ini berlangsung ‘alot’ murid *ngeyel* (bersikeras untuk bagaimana caranya supaya rambut gondrongnya tidak dipotong). Sampai-sampai aparaturs mendapat kecelakaan dalam proses pemangkasan rambut, tangannya banyak lecet terkena gunting karena murid itu memutar-mutarkan badannya bak orang tak waras.

“gak mau pokoknya gue gak mau di potong’kan gue dah dipotong kemaren pak! (semester lalu) ngapain gue kena lagi dipotongin rambut gue, nich loe liat jadi pitak’kan gue. Emang ini sekolah gak tau tren’ye!”¹²

Begitulah salah satu murid *ngeyel* yang tidak mau dipotong rambutnya. Namun tidak semua murid berbuat seperti itu beberapa murid diantaranya pasrah menerima rambut gondrongnya dipotong seperti pada gambar 3.1. Murid kelas tiga ini terlihat rambut gondrongnya pasrah di potong petugas. Apabila semua murid

¹² Pembicaraan salah satu siswa kelas tiga SMA N. 50 Jakarta

dapat kooperatif seperti ini tentu proses penegakan dalam peraturan nomer: B.7. dapat dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya.

Gambar 3.3.
Penegakan kedisiplinan
Dalam aturan poin pelanggaran No. B7



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2010

Beberapa murid memang di potong pada pintu masuk sekolah namun beberapa murid ada yang lolos dari pengawasan aparat. Kala itu penegakan cara berpenampilan khususnya peraturan nomer: B7 hanya pada kelas XII saja. Dari murid yang lolos itu kemudian aparat berpatroli ke seluruh kelas XII bermula di kelas XII IPS V. Dalam penegakan kali ini aparat tidak memberikan pilihan kepada murid gondrong untuk dipotong di tempat pangkas rambut apalagi mengizinkannya untuk potong dikemudian hari. Pada saat itu jua di depan kelas masing-masing murid gondrong dipangkas rambutnya, terlihat pada gambar di atas rambut yang terpangkas berceceran di depan kelas itu. “Di kelas IPS V ada lima murid yang dipangkas

rambutnya, IPS IV ada tiga murid yang dipangkas rambutnya, IPS III ada enam murid yang dipangkas rambutnya, IPS II ada tiga murid yang dipangkas rambutnya namun ada pengecualian bagi murid bernomor induk: 10343 dia tidak mau di pangkas rambutnya padahal gondrong lalu aparatus-pun jera dibuatnya karena dia ternyata adalah anak dari Ir. Widiyanto; ketua komite di sekolah ini”.¹³

“Ada diskriminasi di sekolah mentang-mentang anak ketua komite enggak mau dipotongin... Tuch kak kan si An(inisial nama panggilan) enggak dipotong rambutnya. Tulis kaak di skripsi kakak ada diskriminasi di sekolah gitu, biar semua orang tau tuch si An bisa jadi anak emas di sekolah. Rambutnya bisa gondrong sendiri biar bisa di kata keren, dimirip-miripin dia ama artis Korea, biar kece cewe-cewe di sini. Padahal senjatanya anak ketua komite sekolah!”¹⁴

Begitulah *uneg-uneg* FR yang rambutnya di potong petugas, dia terus protes kepada bapak-bapak guru kesiswaan tentang hal ini, ibarat peribahasa “anjing menggong-gong kafilah berlalu” yang dialaminya. Sedangkan di kelas IPA I ada empat murid yang dipangkas rambutnya dan IPA II hanya seorang murid yang dipangkas rambutnya.

Taksonomi Bloom kepribadian remaja dalam *Conditioning reflect* berperan penting dari fenomena rambut murid yang dipangkas secara ‘pasrah’ maka murid dapat berfikir tentang kondisi sosial tentang peran disiplin; yakni disiplin memangkas rambut itu adalah suatu kebiasaan yang diajarkan disekolahan. Taksonomi Bloom dalam NE. Gronlund menyatakan bahwa: “murid dapat semakin bersosialisasi terhadap kebutuhan manusia lain dan masalah sosial, menaati aturan-aturan sekolah, menunjukkan tanggung jawab terhadap perbaikan sosial, mengerti dan menerima

¹³ Wawancara dengan guru olahraga(Fd), guru sosiologi(Yh) dan beberapa murid kelas XII IPS IV dan V

¹⁴ Murid kelas XII IPS IV

kekuatan serta kelemahan diri sendiri dan menunjukkan kerajinan, disiplin, dan ketepatan waktu”.¹⁵

Dari penjabaran tersebut pembelajaran dapat terjadi melalui pengalaman pribadi murid yang bersangkutan. Bahwa rambut rapi adalah model rambut yang pendek atau model rambut cepak yang boleh jadi merupakan sosialisasi cara pandang sekolah yang disimbolkan melalui sosialisasi cara berpenampilan ala sistem kredit.

2. Melestarikan Penegakan Agen

Dalam Sistem Kredit Poin Secara Non Formal

Tak selamanya pendekatan struktural itu efektif bagi penegakan sistem kredit poin. Dalam praktiknya perlu adanya orientasi subjektif dari para guru selain aparatus. Untuk itu celah dari ruang kosong regulasi dan kebebasan interaksi antara guru – murid dilegitimasi sebagai ‘senjata’ untuk memberikan sosialisasi nasehat positif tentang disiplin bagi murid, biasanya yang paling berperan dari guru agama, kewarganegaraan dan sosiologi yang bernasehat disertai dengan ceramah singkat apalagi jika guru tersebut sedang berstatus piket. Sedangkan guru piket lainnya hanya berupa himbauan seperti “hey itu bajunya dimasukan yang rapi” dan “Oo... tidak bisa bawa-bawa itu makanan ke atas, habiskan di sini!”.

Pagi hari yang sama ada beberapa murid datang terlambat pihak sekolah memberikan toleransi 15 menit sebelum pintu gerbang di tutup, selama itu murid

¹⁵ N.E. Gronlund, *Measurement and Evaluation in Teaching*, Edisi kelima, New York: MacMillan, 1985, dikutip langsung oleh Sri Esti W.D., *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 223-224

diperbolehkan masuk sekolah. Para murid dibariskan di penelitian, dicatat nama dan kelasnya kemudian tas mereka diperiksa oleh guru piket, hal ini dilakukan untuk mencegah perilaku kenakalan remaja. Oleh sebab tidak ada regulasi sekolah untuk melakukan pemeriksaan tas milik murid di sekolah kepada murid terlambat, guru piket mempunyai empati dan otoritas subjektif dalam rangka mendisiplinkan murid.

Gambar 3.4.
Penegakan kedisiplinan Non Formal



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2010

Pengawasan ini menjadi efektif dilakukan dengan sistem acak yang mana tidak tiap hari murid yang terlambat saja dapat diawasi barang bawaannya namun dalam kelas juga sering kali guru tiba-tiba melakukan hal serupa.

“Misalkan pada mata pelajaran tertentu semua barang bawaan murid diperiksa dan kasus pada saat guru menerangkan dan mengajarkan suatu pelajaran kepada murid lalu dia mengantuk atau melakukan gerak-gerik aneh dan tak wajar guru ini langsung memeriksa barang bawaannya itu. Dan terjadwal juga pada minggu pertama di kelas

X-1 hingga X-3, minggu kedua X-4 hingga X-7 minggu seterusnya begitu hingga kelas XII-IPS 5".¹⁶

Pengawasan ini berfungsi untuk pengelolaan ketegangan dalam iklim sekolah; adanya pemakai dan / atau pengedar narkoba dengan salah cara inilah intervensi dari pihak sekolah mengetahui dan mengendalikan kenakalan remaja. Selama kedisiplinan bertujuan untuk membuat iklim sekolah harmonis, sekolah dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu dan wajar untuk melakukan hubungan dominasi tersebut. Meskipun dalam praktiknya dikatakan non formal yang mana tidak terdapat dalam aturan tertulis dari sistem kredit poin, hal disiplin itu dapat ditegakan.

E. Rangkuman

Bab ini mengeksplorasi tentang fungsi penegakan kredit poin dalam rangka mendisiplinkan murid berdasarkan fenomena dari sistem kredit poin yang berisi mengenai dua hal; eksistensi sistem dan kelestarian sistem yang mendidik kepribadian murid secara positif dan hal ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Prinsip sistem kredit poin adalah setiap kasus perlu diproses dengan tuntas dan transparan dengan pendekatan penegakan hukum dan keadilan. Kedua agen harus tuntaskan semua kasus murid bermasalah, dengan cara bersinergi dan berkolaborasi dalam arena politis menjadi kunci eksistensi sistem dan kelestarian sistem.

¹⁶ Informasi bapak Suwignyo guru sejarah dan staf wakasek. Bid. Kesiswaan saat berbincang setelah melakukan penegakan kredit poin no. B7

BAB IV

KESINAMBUNGAN MENINGKATAN DISIPLIN DAN PENDIDIKAN DISIPLIN

A. Pengantar

Bagian akhir dari skripsi ini adalah analisa pada bab sebelumnya dengan situasi dan kondisi yang demikian adanya. Dalam sistem posisi sosial yang terstruktur, kredit poin dapat menggunakan sumber daya yang mana dapat secara kontras maupun terselubung yang digunakan dalam rangka mendisiplinkan murid kemudian melakukan pendekatan kepada murid untuk mencegah permasalahan kepribadian dan tabiat buruk murid yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Serta konsepsi implikasi dari tabiat buruknya itu, pada nilai akademik murid tertentu yang dibahas dalam bab ini.

B. Penilaian Murid Terhadap Aturan Kredit Poin

Dari mayoritas informan dapat diketahui bahwa sistem kredit poin ini mengekang apa-apa yang mereka anggap gaya hidup anak muda masa kini, seperti pameo dahulu kala “belajar sambil bermain” yang boleh jadi falsafah itu tertanam dalam bawah sadarnya. Adapun ada beberapa murid yang berpendapat berbeda dari itu, menurut mereka dalam arena di sini keberadaannya bukanlah untuk bergaya melainkan mereka menganggap layaknya bekerja dengan aturan-aturan dari sekolah.

Hal ini terdeskripsikan dari pernyataan SB seorang siswi kelas X yang dapat mewakili pendapat teman-temannya:

Sebagian besar masalah kepribadian berasal dari faktor bawaan si murid. Seperti fenomena kenakalan vandalisme yang dilakukan secara bersama teman sejawatnya dengan relasi senior-junior, selain itu yang membuat keruh iklim sekolah adalah temuan penelitian berupa kuasa anak komite sekolah si AN. Dalam kasus AN terdapat relasi kuasa atas bawaan ego dalam dirinya yang menganggap bahwa ayahnya adalah penguasa seperti layaknya ketua dewan perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi rakyatnya. Padahal disini kontras terdapat anomali atas struktur kedisiplinan yang masih berlaku hingga saat ini.

Ada satu kasus murid yang penulis anggap fatal disiplinnya. Panggil saja Izu yang telah didiskusikan juga sebelumnya, pelanggaran kedisiplinan yang telah dilakukannya melampaui batas poin yang telah ditentukan sejak semester awal dia masuk sekolah. Alasannya “rumah saya jauh kak dan orang tua saya bercerai”. Lalu pada saat pembagian laporan hasil belajar murid semester gasal Izu tidak masuk sekolah kembali karena menganggap telah divonis tidak naik kelas dan Izu memang tinggal kelas.

Setelah itu, pada semester berikutnya Izu dan ibunya di panggil ke sekolah. Izu diberikan kesempatan bersekolah lagi pada awal semester oleh ibu Nur kepala sekolah tahun 2010 dengan pertimbangan dewan guru. Namun belakangan ini Izu tak tahan dengan iklim sekolah yang tidak kondusif menurutnya, karena teman baiknya diduga menggosip bahwa Izu adalah tetangga satu komplek dengan kepala sekolah

sehingga ia dapat bersekolah kembali. Enam bulan berikutnya Izu dan ibunya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya.

Tidak semua bagian dari sistem bergerak sebagaimana harusnya. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa falsafah *Nemo dat quod non habet* (tidak seorangpun memberikan dari apa yang tidak dimilikinya) adalah benar adanya, sang ibu kepala sekolah tidak mungkin memberikan kuasa untuk Izu dapat bersekolah kembali apabila ibu kepala sekolah tidak berkuasa. Terdapat anomali sistem yang mana menurut sistem kedisiplinan kredit poin tidak demikian adanya.

Mengacu pada sistem tindakan lengkap milik Parsons, yang mana konsepsi adaptasi kepala sekolah, membuat sistem organismik bekerja untuk menyelesaikan masalah dalam kasus Izu. Pemecahan masalah adalah ketika Izu mendapatkan kesempatan kedua untuk bersekolah. Sistem sosial bekerja mana kala telah terjadi kesepakatan rapat dewan guru yang menyatakan bahwa Izu dapat bersekolah lagi.

C. Fungsi Manifest Dalam Kredit Poin

Dalam aturan poin pelanggaran murid terdapat empat kriteria: kehadiran, cara berpenampilan, gaya hidup dan lain-lain. Dan hal ini secara lengkap terlampir dalam skripsi ini. Konstituen dari fungsi-fungsi kedisiplinan dan perubahannya setelah tidak ada kartu pelanggaran murid menjadi dua hal dari empat kriteria yakni hanya kehadiran dan gaya hidup yang bekerja dalam sistem kedisiplinan kredit poin, sedangkan dua lainnya ditangani langsung oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang bertujuan untuk membina permasalahan kepribadian murid.

Fungsi manifest kedisiplinan bagi murid dalam sistem kredit poin adalah melakukan pendekatan permasalahan kepribadian kepada murid bermasalah dalam rangka mengentaskan segala kasus anomali kepribadian di sekolah, dan buktinya dapat penulis deskripsikan pada pengukuran secara deskriptif. Maksud dari pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kesinambungan sistem kedisiplinan kredit poin terhadap peningkatan motivasi belajar murid di sekolah ini.

Penulis mencoba mengukur fungsi nyata berdasarkan responden dengan syarat dan ketentuan yakni murid SMA Negeri 50 Jakarta yang aktif bersekolah, tercantum dalam Legger (daftar prestasi akademik murid) yang menyatakan bahwa murid yang bersangkutan tidak memenuhi KKM (kriteria ketuntasan minimum) dari mata pelajaran yang telah diujikan dan tidak masuk sekolah lebih dari sembilan kali. Atas dasar tersebut dapat diketahui pendeskripsian perhitungannya yakni dari data kuesioner diketahui bahwa dari 37 murid yang membolos 24 diantaranya dengan alasan sudah pasti terlambat. Dengan demikian murid tersebut berdasarkan analisis dari teori motivasi *Cognitive Dissonance* diasumsikan bahwa “Mereka adalah siswa yang disiplin. Mereka betul-betul bodoh melakukan keterlambatan dan keterlambatan ini adalah kesalahan mereka. Jadi, esok mereka berangkat lebih pagi lagi”. Begitulah analisa dari kesinambungan kredit poin. “Terbukti pada analisa responden secara deskriptif yakni dari 24 murid 15 diantaranya adalah murid yang naik kelas. Selain itu jumlah murid yang dikeluarkan karena sistem kredit berjumlah 23 murid”.¹

¹ Analisis Legger pada responden.

D. Fungsi Laten Dalam Kredit Poin

Fungsi terselubung dalam sistem kedisiplinan ini terjadi atas dasar paradigma bahwa relasi antara murid sebagai individu dengan suatu grup sebagai sistem, yang mana si murid itu adalah bagian dari sistem kedisiplinan itu sendiri. Sebagaimana terdapat dalam ukuran yang dijabarkan berbentuk tabel-tabel dalam beberapa variabel yang mengacu pada aturan poin pelanggaran SMA Negeri 50 Jakarta yang diantaranya adalah pada saat murid terlambat datang di sekolah apakah dapat masuk atau tidak, pernah atau tidak pernah murid bolos, dari responden ini yang mendapat sanksi berapa kali dan berupa apa saja, berapa kali orang tua murid atau wali di panggil aparatus dan berapa kali mangkirnya, berapa murid yang diskorsing dan berapa kali diskorsing. Dari kesemuanya itu bersumber dari data hasil kuesioner kemudian diolah data tersebut secara deskripif menggunakan program SPSS (statistical product and service solution) Versi 17.0. Berikut ini adalah tabel dan rinciannya:

Tabel 4.1.
Responden

	Kelas	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	X	11	25.6	25.6	25.6
	XI	7	16.3	16.3	41.9
	XII	25	58.1	58.1	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Dalam tabel dapat diketahui 25,6 persen responden adalah peserta didik kelas sepuluh. Dari persentase tersebut ditampilkan murid tinggal kelas atau lebih dikenal dengan sebutan veteran. Kemudian kelas berikutnya yakni kelas sebelas dengan responden sebanyak 16,3 persen dan kelas dua belas dengan persentase 58,1 persen. Mereka dimaknai murid disiplin rendah dan mendapati motivasi tinggi. Sedangkan murid veteran dimaknai murid yang berdisiplin rendah dan mendapati motivasi yang rendah pula.

Tabel 4.2.
Pengalaman Telat

	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid Pernah	43	100.0	100.0	100.0

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengalaman telat siswa sering terjadi keterlambatan mereka datang. Oleh sebab mereka terlambat mereka mendapatkan poin lima. Dari konsekuensi itu, penutupan pintu gerbang dilakukan pihak sekolah. Dan dianggap tidak masuk sekolah kemudian diberi poin lagi lima.

Tabel 4.3.
Bisa Masuk Sekolah Atau Tidak

	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid Dapat toleransi masuk sekolah	27	62.8	62.8	62.8
Pintu gerbang di tutup	16	37.2	37.2	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Tabel di atas untuk menunjukkan alasan dari pelanggar keterlambatan. Dari frekuensi tertinggi terdapat pada murid yang dapat masuk sekolah dengan mendapatkan toleransi keterlambatan, dengan alasan aparat membolehkannya masuk sekolah. Memang aturan ini sangat tergantung dari aparat, murid dikonstruksikan untuk datang lebih pagi inilah cara mengembangkan disiplin positif. Murid yang dikumpulkan karena keterlambatan, saat itu guru memberikan dorongan dan arahan positif. Beberapa tindakan dari anak bermasalah seperti yang telat, mencari perhatian, menunjukkan kekuatan, balas dendam, anggapan lemah. Semua itu dapat diatasi dengan cara memberikan dorongan dan arahan positif seperti meminta kerjasamanya untuk menyusun rencana berangkat sekolah bersama, saling menghargai dan bekerjasama, mendengarkan dan memahami keterlambatan murid, ungkapan berharga dalam rangka memotivasi untuk datang ke sekolah lebih pagi demi tercapai kebiasaan pada saat masa depan kelak.

Tabel 4.4.
Pengalaman Bolos

	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid Pernah	37	86.0	86.0	86.0
Tidak Pernah	6	14.0	14.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Bolos adalah masalah perilaku murid yang tak patut. Dari tabel di atas diuraikan persentase pengalaman bolos dan sanksi dari guru yang bersangkutan. 60,5 persen dimaknai murid telah mengalami teguran dan pemanggilan orang tua mereka, dalam 34,9 persen dimaknai hanya teguran saja dan sisanya tidak pernah dapat sanksi dan orang tuanya langsung dipanggil masing-masing 2,3 persen. Dari pernyataan mereka bolos suatu tindakan yang menyenangkan ibarat jerat yang membawa lena pada kemalasan disiplin dan motivasi belajar murid.

Tabel 4.5.
Sanksi Dari Guru Yang Bersangkutan

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak pernah dapat sanksi	1	2.3	2.3	2.3
	Teguran	15	34.9	34.9	37.2
	Pemanggilan Ortu	1	2.3	2.3	39.5
	Teguran dan Pemanggilan Ortu	26	60.5	60.5	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Keterkaitannya dalam teori taksonomi afektif: penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi daya nalar yang sepele (cara berfikir), pembentukan pola hidup. Semuanya itu bersifat pribadi dan sangat tergantung sekali pada kebiasaan dalam dan luar sekolah. Konsepsi tersebut dapat dimaknai apabila murid menganggap iklim sekolah lebih menyenangkan maka murid akan bersekolah dan sebaliknya apabila murid menganggap iklim sekolah seperti di penjara atau neraka mereka akan terjerat pada dilema dan apabila hal itu berkesinambungan boleh jadi mereka terjerat yang membawa lena pada kondisi negatif disiplin dan motivasi belajar murid.

Tabel 4.6
Orang Tua Murid Dipanggil Apparatus

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak dipanggil	18	41.9	41.9	41.9
	Sekali datang	9	20.9	20.9	62.8
	Dua kali datang	7	16.3	16.3	79.1
	Tiga kali datang	1	2.3	2.3	81.4
	Lebih dari tiga kali datang	8	18.6	18.6	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Pemanggilan orang tua siswa dapat dilakukan pihak bimbingan penyuluhan, sebagaimana ketentuan dalam sistem kredit itu. Tindakan indisipliner siswa dapat menyebabkan mereka mendapatkan poin pelanggaran. Bilamana poin telah 75 adalah penanda pihak bimbingan penyuluhan untuk melakukan penyuluhan kepada siswa yang bersangkutan.

Tabel 4.7
Orang Tua Mangkir

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak mangkir	38	88.4	88.4	88.4
	Sekali mangkir	2	4.7	4.7	93.0
	Dua kali mangkir	1	2.3	2.3	95.3
	Lebih dari tiga kali mangkir	2	4.7	4.7	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Dalam tabel ditampilkan fungsi terselubungnya: yakni sebagaimana orang tua atau wali murid seharusnya turut berperan aktif dan paling peduli tentang aktivitas akademik si buah hati di sekolah. Sebab dari 25 responden yang berpengalaman menjadi sasaran tindakan hukuman skorsing dari sistem kedisiplinan, 5 responden diantaranya mengalami kurang kepedulian orang tua atau wali murid.

Tabel 4.8.
Pengalaman Diskorsing

	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid Pernah	4	9.3	9.3	9.3
Tidak pernah	39	90.7	90.7	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Tiga dari lima responden itu justru merasa malu untuk mengungkapkan kepada orang tua mereka, walaupun diantara mereka ada yang tidak tahu-menahu mengapa dirinya diberikan hukuman berupa skorsing dari sekolah. Sedangkan yang dia tahu hanya bukti-bukti kartu pelanggaran siswa yang tercantum nama dirinya di dalam kartu itu. Hal tersebut sesuai pada teori belajar *Conditioning Reflect* yang dikemukakan oleh Watson yang mempunyai analisa bahwa anak yang semula tidak takut kepada tikus, kemudian menjadi takut; murid yang semula berterus terang menjadi malu mengungkapkannya walaupun dia belum tentu bersalah atau dengan kata lain murid tersebut telah terima nasib.

Tabel 4.9.
Berapa Kali Diskorsing

	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid Tidak pernah	39	90.7	90.7	90.7
Sekali	4	9.3	9.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2010

Dari sembilan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penegakan dari sistem kredit poin telah dilaksanakan. Berupa tindakan-tindakan nyata yang meliputi tautan positif dari situasi tersebut secara berulang, berpola dan berstruktur yang mana membuktikan bahwa konsepsi sekolah adalah sistem manusia. Dalam teori kepribadian dapat diketahui dari konsepsi kita tentang pikiran manusia beserta kesinambungannya terdapat ego, super ego, *Oedipus Complex*, dan kecenderungan hasrat mau mati. Kesemua itu ditampilkan dalam psikologi perkembangan peserta didik, di mana bagian konstituen dari hal ini adalah kemandirian sebagai kebutuhan psikologis pada remaja. Enung fatimah mengatakan:

“Peran orang tua dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Mengingat masa anak-anak dan remaja merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan kemandirian, pemahaman dan kesempatan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya dalam meningkatkan kemandirian adalah krusial”.²

Dalam tabel 4.9. ditampilkan sanksi dari pihak sekolah mulai dari pemanggilan orang tua sampai skorsing, kesadaran memandirikan anak adalah peran orang tua yang sebaiknya dikembangkan dengan cara berkomunikasi dengan anak,

² Enung fatimah, Psikologi Perkembangan, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 146

memberikan kesempatan kepada anak untuk membuktikan keputusan yang telah diambilnya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalankan konsistensi orang tua dalam menerapkan disiplin di rumah.

E. Rangkuman

Dalam ketiga bagian analisis dari bab ini dapat diketahui bahwa penilaian murid dari kedisiplinan dikodratkan oleh penekanan dari penegakan sistem kredit poin, sebagaimana pernyataan Sabrina yang mewakili teman-temannya yang sependapat. Pendapat berbeda muncul dari informan berpengalaman tentang sistem kredit poin sebagai responden dari kuesioner yang dianalisa menunjukkan hasil yang berbeda. Murid yang mayoritas melakukan pelanggaran kedisiplinan ialah murid yang terkekang di sekolah, mereka mengibaratkan sekolah adalah penjara.

Di dalam sekolah sistem kredit poin yang digunakan cukup efektif, ini karena mengacu kepada fungsi kedisiplinan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan fungsi kredit poin sebagai pengendali kerajinan siswa diharapkan dapat menjadi etos belajar bagi munculnya prestasi akademik, seperti halnya yakni MTQ juara satu dan *runner-up* dan khotib juara satu se-jakarta timur dalam kurikulum agama Islam pada tahun 2009, juara dua membaca puisi dan juara skenario teater dalam kurikulum bahasa Indonesia dan juara satu cepat tepat rokris dalam kurikulum agama Kristen pada tahun 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data atau informasi yang diperoleh melalui penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertama, terdapat dua cara melestarikan sistem kedisiplinan ini yakni cara formal dan cara non formal. Secara formal adalah perlakuan aparatus dalam menegakan sistem kedisiplinan sesuai pada aturan yang ada. Sedangkan cara informal adalah perlakuan aparatus dalam menegakan sistem kedisiplinan dengan intrik-intrik pada motif pencapaian tujuan; memberikan keyakinan dari suatu implikasi tertentu, kognisi serta implikasi tertentu dan dogma kepada pihak terkait supaya mau bersinergi dan berkolaborasi untuk memotivasi murid supaya disiplin, biasanya berupa ancaman kepada murid yang bersangkutan.

Kedua, ada dua fungsi dari tautan kedisiplinan yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Keduanya memiliki peran yang sama yakni meningkatkan motivasi belajar murid. Keberadaan remaja di sekolah sebagai murid tentu berbeda dengan keberadaannya di luar sekolah. Jadi, yang dilakukannya di dalam sekolah seharusnya patuh dan taat pada peraturan yang telah dibuat oleh sekolah, sebagai institusi publik pendidikan berperan penting dalam hal penjadian peserta didik dalam ruang publik di institusi ini. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi pokok aparatus boleh jadi lebih ringan, sebab dalam posisi iklim sekolah yang normal dari jumlah murid yang

mempunyai tabiat nakal perbandingannya jauh lebih sedikit dari pada murid yang mempunyai kompetensi baik dalam bidang akademik atau dalam tafsir bilangan dalam rata-rata tiap kelas terdapat dua sampai tiga murid yang mempunyai tabiat nakal dari empat belas kelas oleh sebab itu mereka dijadikan responden.

Ketiga, kedisiplinan sistem kredit poin dapat efektif disekolah ini, oleh sebab efek jera yang ditimbulkan karena siswa pelanggar tidak mengindahkan kedisiplinan tersebut. Kemudian secara penegakan agen di sekolah dapat meminimalkan tindak latensi pelanggar sistem kredit. Dengan demikian mendisiplinkan siswa dapat terjadi tanpa kekerasan dan kehormatan hak azasi siswa tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ambil beberapa saran yaitu pertama, konsepsi norma kredit poin di sekolah tersebut terbukti baik, hal ini terbukti dari kedisiplinan siswa yang solid. Maka dari itu sistem yang telah terstruktur harus dipertahankan dan di tingkatkan. Kedua, fungsi kredit poin yang telah terstruktur dapat dipertahankan. Karena dapat memacu prestasi siswa dibidang akademik. Ketiga, sistem kredit poin yang diterapkan efektif, hal ini berdampak pada minimalnya tindak latensi pelanggar sistem kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, Richard I. 2008. *Learning To Teach II*. Terjemahan Helly P.S. & Sri M.S. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ballantine, Jeanne H. 1983. *The Sociology Of Education A Systematic Analysis*. New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall Inc.
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka sinar harapan.
- Ayan, Jordan. 2002. *Bengkel Kreativitas*. Bandung: Mizan media utama.
- Fatimah, Enung. 2006. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Terjemahan Maufur & Daryanto. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gronlund, N.E. 1985. *Measurement and Evaluation in Teaching*, Edisi kelima, New York: MacMillan.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maliki, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasution, S. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: GI.
- Nelsen, Jane. 1997. *Positive Discipline*. Terjemahan Sumarjinah. Jakarta: Delapratasa.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama.
- S. Khalsa, Sirinam. 2008. *Pendidikan Disiplin & Harga Diri*, terjemahan Hartati Widyatuti, Jakarta: Indeks.
- Sarup, Madan. 2008. *Postrukturalisme & Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.

Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sujanto, Bedjo. 2008. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: C.V. Sagung Seto.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Depok: Penerbitan Ekonomi Universitas Indonesia.

Turner, Jonathan H., dan Maryanski, Alexandra. 2010. *Fungsionalisme*. Terjemahan Anwar Efendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

W.D., Esti, Sri. 2008. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Grasindo.

Weber, Max. 2009. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Terjemahan Noorkholish. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zafiera, Ferdinand. 2008. *Sigmund Freud*, Yogyakarta: Prismsophie.

Karya Ilmiah:

Widyaningsih, Susi. *Hubungan Antara Disiplin dan Prestasi Belajar*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jakarta, 1983.

Dede kurniasih, *Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah*, Skripsi, UNJ, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2010.

POINT PELANGGARAN
SMA NEGERI 50 JAKARTA
TAHUN PEMBELAJARAN 2009 - 2010

NO	PELANGGARAN	POINT	PENANGANAN
A KEHADIRAN			
1	Hadir lebih dari pukul 06.30	3	Pembinaan, Pemanggilan ortu
2	Hadir lebih dari pukul 06.40	5	Pemanggilan Ortu, Pintu gerbang ditutup
3	Tidak masuk disebabkan izin yang tidak logis	2	Pembinaan, Pemanggilan ortu
4	Tidak masuk tanpa keterangan	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu
5	Meninggalkan jam pelajaran saat KBM tanpa seizin guru di kelas setelah mata pelajaran	2	Pembinaan, Pemanggilan ortu
6	Tidak hadir pada kegiatan senam yang dijadwalkan tanpa izin yang logis	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu
7	Tidak hadir pada peringatan hari-hari besar Nasional dan Hari besar Keagamaan	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu
8	Tidak mengikuti upacara, Unjuk kebolehan, Dialog Interaktif pada hari senin	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu
B CARA BERPEMILIHAN			
1	Tidak mengenakan seragam sesuai dengan aturan ber-seragam pada hari tsb	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu, Seragam disita sekolah
2	Menggunakan seragam yang sempit, pendek, panjang dan atau besar yang tak sesuai ukuran tubuh	5	Pembinaan, Pemanggilan ortu, Seragam disita sekolah
3	Menggunakan Aksesoris seragam yang dipandang guru dan karyawan bukan untuk digunakan disekolah	5	Disita sekolah
4	Tidak mengenakan sepatu hitam saat kegiatan KBM disekolah	5	Disita sementara sekolah, Hari berikutnya disita
5	Menggunakan sepatu dengan bagian belakang diinjak dan atau sepatu yang tidak layak digunakan di sekolah	5	Disita sementara sekolah, Hari berikutnya disita
6	Menggunakan sepatu yang bertali dan atau tali sepatu yang tidak dikat atau dirapikan	5	Disita sementara sekolah, Hari berikutnya disita
7	Rambut panjang menyentuh daun telinga dan kearah baju dan atau panjang rambut depan melebihi alis mata	5	Dipotong oleh petugas
8	Menyemir rambut	5	Pembinaan, Hari berikutnya dipulangkan
9	Model rambut yang dipandang guru atau karyawan tidak sesuai dengan tempatnya (lingkungan sekolah)	5	Dipotong oleh petugas
10	Menggunakan jaket, switer, rompi atau sejenisnya dilingkungan sekolah, sedang tubuh dalam keadaan sehat	5	Disita sementara sekolah, Hari berikutnya disita
C GAYA HIDUP			
1	Menghisap rokok dilingkungan sekolah	20	Pemanggilan Ortu dan diskors 2 hari
2	Mengonsumsi minuman keras, Narkoba dan obat Phycotropika	25	Pemanggilan Ortu dan diskors
3	Membawa dan atau membaca bacaan yang mengandung pornografi dan pornoaksi	25	Pemanggilan Ortu dan diskors 2 hari
4	Membawa Handpone/Kamera/laptop/handycam atau teknologi lain yang mengandung pornografi dan porno	25	Pemanggilan Ortu dan diskors 2 hari
5	Menggunakan Handshet tidak saat istirahat	25	Disita sementara, Hari berikutnya disita
6	Berprilaku, bertingkah laku dan perbuatan yang dinilai Masyarakat merupakan bagian dari pornografi	Max 50	Pembinaan, Pemanggilan Ortu, Dikeluarkan
7	Berprilaku, berpakaian dan beraksesoris yang tidak sesuai dengan jenis kelamin	10	Disita, Pemanggilan Ortu

PELANGGARAN			PENANGGAMANI		
NO		POINT			
8	Merayakan ulang tahun selama disekolah, serta mengganggu ketertiban, ketenangan dan kebersihan sekolah	25			Pembinaan, Pemanggilan Ortu
9	Membawa mobil disekolah saat KBM berlangsung	20			Pembinaan, Pemanggilan Ortu
10	Membawa sarana atau alat perjudian	10			Pembinaan, Pemanggilan Ortu, alat benda yang alat dan benda yang digunakan disita
11	Melakukan perjudian disekolah	25			Pembinaan, Pemanggilan Ortu, alat benda yang digunakan disita dan diskors 2 hari
D LAIN-LAIN					
1	Membawa rokok atau korek	10			Pemanggilan Ortu, Rokok tersebut disita
2	Membawa rokok dan atau jajanan yang mengandung unsur narkoba atau obat phy:cotropika	50			Dikeluarkan
3	Melakukan pelecehan seksual	20			Pembinaan, Pemanggilan Ortu, Diskors 2 hari
4	Mengganggu ketertiban dan ketenangan saat disekolah atau pada saat kegiatan ibadah	20			Pembinaan, Hari berikutnya Pemanggilan Ortu
5	Melawan secara langsung atau tidak langsung terhadap kepala sekolah, guru dan atau karyawan	30			Pemanggilan Ortu dan Diskors 2 hari
6	Mengancam, mengintimidasi dan atau melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kekerasan fisik dan phycologis	50			Pembinaan, Pemanggilan Ortu, Diskors 2 hari
7	melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri yang dapat ditolerir	30			Pembinaan, Pemanggilan Ortu, diskors 2 hari
8	Melakukan kegiatan atau kerjasama dengan pihak luar sekolah atas nama sekolah tanpa seizin Pimpinan sekolah dan atau kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	25			Pemanggilan Ortu, Dirumahkan sementara (diskors)
9	merusak sarana dan prasarana sekolah	20			Pembinaan, Menganti sarpras yang dirusak
10	Melakukan tindak kriminal pembunuhan dan atau pemerkosaan	100			Dikeluarkan
11	Mengedarkan Narkoba dan Obat Phycotropika	100			Dikeluarkan
12	Membawa alat atau bahan yang melukai dan membunuh orang lain	50			Dikeluarkan
13	Melakukan perbuatan , tingkah laku, etika yang dinilai negatif oleh sebagian besar Masyarakat yang belum tercantum dalam point-point pelanggaran di atas.	20			Pembinaan, Pemanggilan Ortu

KETERANGAN : DI RUMAHKAN SEMENTARA DIHITUNG TIDAK HADIR (TANPA KETERANGAN)

Bila sudah terjadi pembinaan oleh WALAS dan BK, siswa masih melakukan pelanggaran, maka

1. Siswa akan di rumahkan sementara selama 3(Tiga) hari jika secara akumulatif point pelanggaran siswa sama dengan 75 point
2. Siswa akan dikeluarkan, jika siswa telah mengumpulkan point pelanggaran secara akumulatif sama dengan 100 point

Mengetahui,
Kepala

Jakarta, Juli 2009
wakil Kesiswaan

Dra. Hj Nur Hidayati
NIP/NRK : 130684776/138312

Drs. Dwi Priyo Eko S
NIP : 131804450

Kuesioner Penelitian Penegakan Kedisiplinan Dalam Sistem Kredit Poin
SMA Negeri 50 Jakarta

Nama :

Kelas :

Aturan menjawab:

- Berilah tanda jika pertanyaan pilihan ganda
- Isi penyebab dari pertanyaan pilihan sesuai situasional di sekolah
- * Coret yang tidak perlu

1. Pernah atau tidak pernah anda terlambat datang ke sekolah:

Pernah

Tidak pernah

2. Apabila pernah, dapat atau tidak dapat masuk sekolah:

Ya, Saya dapat masuk sekolah walaupun terlambat datang

Sebab:

.....

Tidak, Saya tidak dapat masuk sekolah karena terlambat datang

Sebab:

.....

3. Pernah atau tidak pernah anda membolos sekolah:

Pernah

Tidak pernah

Sebab:

.....

4. Apabila pernah(pertanyaan no. 1 & 3), pilih tindakan guru berwenang:

Teguran

Pemanggilan orang tua atau wali murid

Teguran dan pemanggilan orang tua atau wali murid

Tindakan guru berwenang yang lain(jika ada):

.....

5. Apabila pernah dipanggil orang tua atau wali murid anda:

- Datang orang tua atau wali murid anda, berapa kali; 1 / 2 / 3 / > 3)*
- Tidak datang orang tua atau wali murid anda, berapa kali; 1 / 2 / 3 / > 3)*

6. Pernah atau tidak pernah anda dapat *skorsing*:

- Pernah
- Tidak pernah

Sebab:

.....

7. Apabila pernah dapat *skorsing*:

- Berapa kali; 1 / 2 / 3 / > 3)*
- Berapa minggu; 1 / 2 / 3 / > 3)*

DAFTAR WAWANCARA

Jabatan : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
Status : Pegawai negeri sipil di SMA Negeri 50 Jakarta

1. Pak, bagaimana sejarah kedisiplinan di sekolah ini?

Jawab: Sebelum tahun 2004 sekolah mulai banyak diterapkan kedisiplinan untuk meminimalkan kasus pelanggaran disiplin mulai dari penanganan secara mendidik misalkan anak yang terlambat dimasukkan ke perpustakaan untuk membaca buku atau menulis dari buku yang dianggap perlu namun disalahgunakan murid, mereka lebih senang terlambat daripada dihukum seperti itu.

2. Pak, kedisiplinan sistem kredit poin berasal dari mana?

Jawab: gagasan kredit poin bermula dari dinas pendidikan. Sehingga semua sekolah di DKI Jakarta diharapkan dapat menerapkannya.

3. Pak, setelah bapak tadi menjelaskan tentang sejarah disiplin di sekolah ini. Penjelasan lengkap tentang mekanisme permulaan kedisiplinan sebelum sistem kredit bagaimana ya pak?

Jawab: ya... jadi begini Dam. Sebelum saya menjabat jadi kesiswaan, seingat saya tu mula-mula soal keterlambatan tu siswa disuruh bersih-bersih sekolah. Tapi nyatanya para siswa justru mangkal di kantin malah gak bersihin sampah, yang seharusnya nyapu kek, ngosek wc kek... eh, udah terlambat malahan mereka enak-enakan sarapan di kantin sekolah. Setelah itu, dirasakan gagal untuk mendisiplinkan siswa buat peraturan baru yakni yang terlambat disuruh pada masuk perpustakaan], Dam. Diberi tugas untuk belajar mempersiapkan pelajaran berikutnya. Tapi tiap diawasi mereka selalu mengobrol dengan alasan lagi diskusi pak. Kemudian diubah menjadi menulis “saya berjanji tidak terlambat lagi” tapi mereka mengelabui dengan cara keesokan harinya mereka telah memfotokopi tulisan tersebut. Setelah kejadian tersebut siswa terlambat tidak dihukum masuk perpustakaan lagi. Cara ni terakhir Dam buat mendisiplinkan siswa sebelum aturan kredit poin, caranya pembinaan fisik Dam, siswa terlambat disuruh lari beberapa kali mengelilingi lapangan sekolah. Namun ada keberatan Dam, dari orang tua murid karena anaknya pingsan karena kelelahan dan menderita penyakit tertentu. Dari desakan orang tua murid itu upaya mendisiplinkan dengan cara ini pun gagal ditegakkan.

Jabatan : Guru bimbingan penyuluhan
Status : Pegawai negeri sipil di SMA Negeri 50 Jakarta

1. Bu, apa kendala dalam menerapkan kedisiplinan?

Jawab: Dam, itukan sistem kredit, pake kartu pelanggaran ya... nah itu kartu sering dipake siswa-siswa buat bohong. Di kartu tuh mereka tulis nama temannya yang justru gak ngelakuin kesalahan gitu.

2. Jadi, sekarang mekanismenya berubah'kah Bu?

Jawab: Yaiyalah Dam... sekarang tuh ya gak pake katu-kartu segala. Langsung tembak aja pelanggarannya apa. Dan pelanggarannya yang jelas-jelas ada bukti – ada saksinya, baru bisa... he'eh dikenain poin gitu. Sedangkan pelanggaran yang ecek-ecek lupain aja deh bikin puyeng tuh, Dam.

Informan : Murid berpengalaman tentang sistem kredit poin
Status : Murid kelas XI SMA Negeri 50 Jakarta

1. Apa yang kamu alami dalam penerapan disiplin di sekolah ini?

Jawab: tergantung kasusnya kak, pelanggaran apa...

- Ape ge yang loe inget.

Jawab: gini kak ngisep[merokok] misalnyekan kita ngisep di kelas tuh anak-anak dah pada tau deh, kita-kita gak bakal lapor ke BP.

- Kenapa pada takut maksud loe?

Ya, kan kita-kita dah pada pren kak, solid gitu. Lagian si kumis gak bakalan bisa ngejatoin poin ke kita-kita kak, kan gak de' buktinya gitu kak.

- Lah kan si kumis bisa tau kalo di kelas loe pade ngisep?

Si bocahnya[murid perokok] dah pada nge-tepin[pengancaman] anak-anak di kelas, biasanya pas situasi kelas lagi sepi.

- Kapan tuh?

Yee... jaman-jamannya remed[remedial] gitu kak, kan gak semua pren pada masuk. Biasanya sih pas isoma[istirahat sekolah] gitu kak.

2. Nah, kalo telat... ceritain dong pendapat loe!

Jawab: bangke tuh aturan... apalagi kalo guru piketnya killer gitu dah. Dia pengang jam mulu dah kayak malaikat pencabut nyawa. Telat dikit aja pintu gerbang langsung ditutup. Trus dicatetin poin-poinnya. Et, dah gini nih salah satu ngapah gue enggak naek[kelas].

3. Zu, pelanggaran lainnya gimana?

Jawab:kalo yang lain tuh Cuma boong-boongan[bohong] doang kak. Kayak masukin baju, buang sampah, judi, pake sepokat[sepatu] diinjek-injek, pokoknya yang gitu-gitu deh kak.

- Maksud loe gak dikasih poin gitu?

Iyee...

Informan : Murid berprestasi
Status : Murid kelas X SMA Negeri 50 Jakarta

1. Apa pendapat kamu tentang kedisiplinan sistem kredit poin?

Jawab: Biasa aja kak.

- . Kalo kayak dandan gitu, sebagai wanita pengen'kan... Itu kan sesuatu pelanggaran, pernah pa enggak ngelakuin itu?

Boro-boro dandan lagian'kan gak boleh. Saya stress menghadapi ujian sekolah saja dengan ketentuan KKM begitu tinggi masih aja remed[remedial], saya alami sendiri bahwa ada beberapa faktor dari kegagalan [akademik] pertama kurangnya [saya] disiplin jika terlambat'kan tidak bisa sekolah, kedua meremehkan pelajaran sekolah yang saya anggap itu gampang, ketiga tidak percaya diri pada saat ujian, keempat walaupun dalam ujian saya gagal istilahnya kak ach ntar'kan ada remedial inih. Dengan begitu saya menganggapnya bersekolah adalah pekerjaan saya.

RIWAYAT HIDUP



ADAM SETYOBISMO, Terlahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 1988. Anak pertama dari dua bersaudara ini mengawali karir pendidikannya pada tahun 1993 di sekolah TK AL – Hamidiyah di daerah Pancoran Mas – Depok. Setelah itu ia menamatkan pendidikan Sekolah Dasarnya di SDN Mampang 01 pada tahun 2000. Sekolah Dasar yang lokasi keberadaanya tidak jauh dari taman kanak-kanaknya. Perjalanan menuju 2 sekolah favoritnya ini selalu ia tempuh dengan berjalan kaki, karena tak jauh dengan letak rumah orangtuanya. Kebanyakan teman sekolahnya pada waktu itu adalah para tetangganya sendiri, sehingga cukup memiliki ikatan sosial yang kuat terutama ketika sedang mengerjakan PR. Karir sekolah menengah pertama ditempuhnya dalam kurun waktu 3 tahun dan berakhir pada tahun 2003. Ia menghabiskan waktu pendidikan SMP-nya di SMP BINTARA – Depok, yang keberadaan lokasinya kali ini cukup jauh dengan letak rumahnya. Sehingga apabila berangkat dan pulang sekolah menuntutnya untuk terbiasa menggunakan angkutan umum dan sepeda. Baginya, belajar mempergunakan angkutan umum dan sepeda pada waktu itu merupakan pengalaman yang menarik, karena dari sana ia mampu belajar mandiri dari orangtuanya dan belajar mengenal setiap sudut dari kota kecil yang membesarkannya. Tahun 2006 ia menamatkan pendidikan SMA-nya di SMA N.50 DKI Jakarta. Letak sekolahnya ini tak jauh dari letak sekolah SMP-nya saat itu, hanya berkisaran 3 s/d 4 KM. Di tahun yang sama tepatnya setelah lulus SMA, ia mencoba peruntungannya dalam tes ujian mandiri di UNJ. Berkat program seleksi ini, ia bisa berkumpul dalam ikatan civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, khususnya dalam kelas pendidikan sosiologi non reguler 2006. Studi sosiologi yang melekat sebagai jati diri awalnya buka mata pelajaran favoritnya, bahkan ketika SMA ia cenderung memandang ilmu sosial ini dengan sebelah mata. Namun kini, ia merasa sangat beruntung sekali bisa mendalami dan ikut serta berdedikasi dalam bidang studi ini. Baginya sosiologi merupakan bidang pengetahuan yang luar biasa. Ia merasa sangat cerdas ketika mampu peka dan memahami setiap gejala-gejala sosial masyarakat disekelilingnya, walaupun ia sungguh tidak pandai dalam ilmu eksakta.